

**IMPLEMENTASI PROGRAM TANGERANG BERKEBUN  
DI KECAMATAN PINANG DAN KECAMATAN  
KARANG TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh

Dhani Chairani

6661110960

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**SERANG, 2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhani Chairani  
NIM : 6661110960  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Juli 1993  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM TANGERANG BERKEBUN DI KECAMATAN PINANG DAN KECAMATAN KARANG TENGAH adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juli 2018



**Dhani Chairani**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

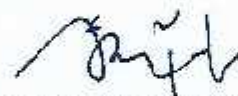
Nama : Dhani Chairani  
NIM : 6661110960  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM TANGERANG BERKEBUN DI  
KECAMATAN PINANG DAN KECAMATAN KARANG  
TENGAH

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 10 bulan  
Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Juli 2018

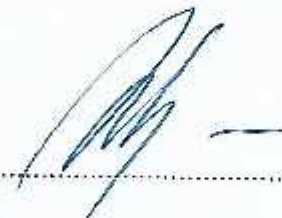
Ketua Penguji

Dr. Arenawati, M.Si  
NIP. 197004102006042001



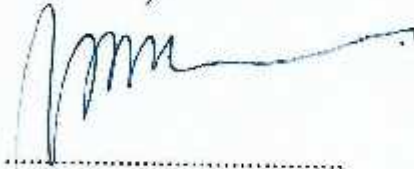
Anggota:

Drs. Hasuri Wasch, M.Si  
NIP. 196202032000121002



Anggota:

Dr. Gandung Ismanto, M.M  
NIP. 197408072005011001



Mengetahui,

Dekan FISTP Untirta  
  
Dr. Agus Sjafri, M.Si  
NIP. 197708242005011002

Ketua Program Studi  
  
Listyaningsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Dhani Chairani  
NIM : 6661110960  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM TANGERANG BERKEBUN  
DI KECAMATAN PINANG DAN KECAMATAN  
KARANG TENGAH

Serang, Juli 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Agus Sjafari, M.Si  
NIP. 197108242005011002

Pembimbing II



Dr. Gandung Ismanto, M.M  
NIP. 197408072005011001

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta



Dr. Agus Sjafari, M.Si  
NIP. 197108242005011002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“It always seems impossible until it’s done.” — Nelson Mandela

### Persembahan

“Dengan penuh cinta dan sebagai bentuk terima kasih, ku persembahkan skripsi ini untuk Mama dan Papa yang tidak pernah lelah mendoakan dan dengan sabar memahamiku. Serta untuk adikku agar tidak berhenti menuntut ilmu.”

## ABSTRAK

**Dhani Chairani. NIM: 6661110960. Skripsi. Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, M.Si. Pembimbing II: Dr. Gandung Ismanto, M.M.**

Tangerang Berkebun adalah program yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang untuk mengembangkan sektor pertanian dengan cara menerapkan sistem pertanian perkotaan dengan tujuan untuk pemenuhan gizi keluarga. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah menemui berbagai permasalahan seperti tidak dilibatkannya petani lokal pada Program Tangerang Berkebun; waktu pembinaan masyarakat yang terbilang singkat; kurangnya minat dan motivasi masyarakat untuk membudidayakan tanaman; dan belum dilibatkannya kaum muda pada penyelenggaraan Program Tangerang Berkebun. Untuk mengkaji permasalahan yang muncul, peneliti menggunakan teori implementasi publik menurut Van Metter Van Horn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi serta metode penelusuran data online. Proses analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dan mengadakan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah sudah berjalan dengan cukup baik. Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu libatkan para petani dan kaum muda dalam penyelenggaraan Program Tangerang Berkebun untuk membantu meningkatkan minat dan memotivasi masyarakat agar mau mengikuti kegiatan budidaya tanaman.

**Kata Kunci: Implementasi, Program Tangerang Berkebun, Pertanian Perkotaan**

## **ABSTRACT**

***Dhani Chairani. NIM: 6661110960. Undergraduate Thesis. The Implementation of Tangerang Gardening Program in Pinang Subdistrict and Karang Tengah Subdistrict. Study Program of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1<sup>st</sup> Advisor: Dr. Agus, Sjafari, M.Si. 2<sup>nd</sup> Advisor: Dr. Gandung Ismanto, M.M.***

*Tangerang Gardening is a program proclaimed by Food Security Department of Tangerang City to developing the agricultural sector by applying an urban farming system with the aim of fulfilling family nutrition. However on the practice, the implementation of Tangerang Gardening Program in Pinang Subdistrict and Karang Tengah Subdistrict encountered various problems such as local farmers are not involved in Tangerang Gardening Program; time of people's coaching is fairly short; lack of interest and people's motivation to cultivate crops; and young people have been not involved in the implementation of Tangerang Gardening Program. For reviewing the shown problems, writer is using theory of public policy implementation by Van Metter and Van Horn. The aims of this research are to know about implementation of the program and some kind of factors which detain in implementation. This research is use qualitative descriptive method and writer do act as a researsch instrument. Data is gained from interviews, observations, documentation studies, and online data searching. Data analytic process is using model which stated by Miles and Huberman. Data validity testing procedures are do with triangulation and do member check. The results of this research shown that the implementation of Tangerang Gardening Program in Pinang Subdistrict and Karang Tengah Subdistrict is already well enough. Recommendations from writer are involve the farmers and young people in the implementation of Tangerang Gardening Program to help increase people's interest and motivation to participate in cultivation activities.*

***Keywords: Implementations, Tangerang Gardening Program, Urban Farming***

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga penyusunan proposal skripsi ini terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga, kesabaran serta doa yang tak pernah putus.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah”.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti juga memperoleh bantuan bimbingan dan saran baik berupa moril maupun materiil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta selaku Dosen Pembimbing I



yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Imam Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Dr. Arenawati., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi peneliti.
7. Dr. Ipah Ema Jumiati., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing peneliti dari awal hingga akhir.
8. Dr. Gandung Ismanto, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Hasuri Waseh, M.Si selaku Penguji Sidang Skripsi peneliti.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu selama menjalani perkuliahan.

11. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
14. Kecamatan Pinang dan kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
15. Kecamatan Karang Tengah dan kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang dan Kelurahan Parung Jaya, Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur dan Kelurahan Parung Jaya, Kota Tangerang yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Kedua orang tua dan keluarga yang telah membimbing, mendoakan, sabar, dan memberikan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

19. Rekan-rekan peneliti: Gesti Resti Fitri, Krisna Kristianing, Desy Hartining, Nita Retnasari, Veronica Puspaningtyas, Revi Selvia S., Vergie Putri Gayatri dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman mahasiswa kelas C Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2011 yang telah memberikan banyak pengalaman, dukungan, serta doa.
21. Rekan-rekan di BEM FISIP 2012 serta senior, junior, dan rekan-rekan lainnya yang telah mengajarkan banyak hal dan berbagi pengalaman selama peneliti mengikuti kegiatan BEM FISIP 2012. Serta teman-teman KKM 47 Untirta 2014 yang telah belajar bersama mengenai kehidupan bermasyarakat.
22. Sahabat-sahabat peneliti semasa perkuliahan Nurjanah, Dian Nurul Utami, Whilda Madyafistar, Feby Ramdini, dan Fany Kurniati. Terima kasih atas persahabatan yang sudah terjalin sejak ospek, segala dukungan, dan kenangan manis semasa kuliah.
23. Sahabat-sahabat peneliti Riyan Andika dan Feri Achmad Nurfaizal. Terima kasih atas segala dukungan, doa, serta kasih sayang yang telah kalian berikan.
24. Sahabat-sahabat Paskibra SMAN 9 Tangerang: Rendy Setyawan, Fery Zuriansyah, Irma Hasanah, Wida Waspandani, Zulfikar Hanif, dan teman-teman lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan serta pengalaman yang telah kalian berikan selama ini.

25. Teman-teman Komunitas YOT Tangerang: Mawardi Hry Mustofa, Sonia Yunita, Elvita Sari, Isfi Rohmah, Ikha Harum Prihanti, Zserly Yusyar, Ruth Hillary, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, serta pengalaman yang telah dibagi bersama.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukungannya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada proposal skripsi yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi almamater beserta para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tangerang, Juli 2018

Peneliti

Dhani Chairani

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Batasan Masalah .....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	14
1.6 Manfaat Penelitian .....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	14
1.6.2 Manfaat Praktis .....	15
<b>BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR</b>	
2.1 Deskripsi Teori .....	16
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik .....	17
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.1.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik .....	25
2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	26
2.1.5 Deskripsi Program Tangerang Berkebun .....	34
2.2 Penelitian Terdahulu .....	37
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	41

2.4	Asumsi Dasar Penelitian .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Pendekatan dan Metode Penelitian .....	45
3.2	Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .....	46
3.3	Lokus Penelitian .....	46
3.4	Fenomena Yang Diamati .....	47
3.4.1	Definisi Konsep .....	48
3.4.2	Definisi Operasional .....	48
3.5	Instrumen Penelitian .....	51
3.5.1	Sumber Data Penelitian .....	53
3.5.2	Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.6	Informan Penelitian .....	61
3.7	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	64
3.8	Uji Keabsahan Data .....	68
3.9	Jadwal Penelitian .....	69
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian .....	71
4.1.1	Gambaran Umum Kota Tangerang .....	71
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang .....	75
4.2	Deskripsi Data Penelitian .....	93
4.2.1	Deskripsi Informan Penelitian .....	95
4.2.2	Hasil Penelitian Lapangan .....	97
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	129
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	141
5.2	Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		xvi
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Lahan Di Kota Tangerang 2012-2016 .....	2
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara .....	57
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian .....	62
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .....	70
Tabel 4.1 Kode Penelitian .....	94
Tabel 4.2 Deskripsi Informan Penelitian .....	95
Tabel 4.3 Hasil Observasi Atas Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	132
Tabel 4.4 Hasil Observasi Atas Dimensi Sumberdaya .....	134
Tabel 4.5 Hasil Observasi Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana .....	136
Tabel 4.6 Hasil Observasi Atas Dimensi Sikap/Kecenderungan (Disposisi) ....	137
Tabel 4.7 Hasil Observasi Atas Dimensi Komunikasi Antar Organisasi .....	138
Tabel 4.8 Hasil Observasi Atas Dimensi Lingkungan Eksternal .....	140

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Rencana Pola Ruang Kota Tangerang .....	4
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Data Menurut Miles dan Huberman .....	66
Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Tangerang .....	72
Gambar 4.2 Kegiatan Penanaman Bibit Melon Pada Program Tangerang Berkebun .....	115
Gambar 4.3 Panen Kangkung Hasil Program Tangerang Berkebun .....	117
Gambar 4.4 Sosialisasi Program Tangerang Berkebun serta pemberian bibit cabai kepada masyarakat .....	123



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, membuat negara dengan luas wilayah 1.916.862,20 Km<sup>2</sup> ini dikenal sebagai negara agraris. Di negara agraris seperti Indonesia, sektor pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan luas lahan pertanian 8.087.393 Ha, sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bertani atau bercocok tanam.

Meski lekat dengan wilayah pedesaan, sektor pertanian masih berkembang di beberapa wilayah perkotaan. Sayangnya, laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin cepat membuat lahan pertanian di wilayah perkotaan semakin berkurang jumlahnya. Sebagian masyarakat berpendapat hal tersebut membuat pengembangan sektor pertanian sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Namun pendapat seperti itu tidaklah tepat sebab meski bukan sektor unggulan, di beberapa wilayah perkotaan sektor pertanian masih menjadi bagian penting untuk masyarakat lokal terutama yang berprofesi sebagai petani. Termasuk di wilayah Kota Tangerang.

Kota Tangerang merupakan wilayah perkotaan yang terletak di sebelah barat Provinsi Banten dan berbatasan langsung dengan ibukota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang salah satu kota penyangga DKI Jakarta bersama dengan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Meski tergolong dalam wilayah perkotaan, Kota Tangerang masih memiliki lahan pertanian aktif di sejumlah wilayah. Namun sejak tahun 2012 luas lahan pertanian aktif di Kota Tangerang semakin berkurang secara signifikan. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Luas Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2016**

Tahun	Luas Lahan Di Kota Tangerang (Ha)	
	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Di Kota Tangerang.	Luas Lahan Kering Yang Digunakan Sebagai Tegal/Kebun/Ladang/Huma Di Kota Tangerang.
2012	814,55	894,10
2013	757,97	735,06
2014	671,97	721,06
2015	652,97	702,06
2016	636,97	696,06

(Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018)

Jumlah lahan pertanian aktif di Kota Tangerang yang terus berkurang setiap tahunnya berdampak pada berkurangnya fokus Pemerintah Daerah Kota Tangerang terhadap pengembangan sektor pertanian di wilayah Kota Tangerang yang kemudian mengubah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang menjadi Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Hal ini terjadi karena sektor pertanian merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah pasal 12 ayat 3, sehingga ada atau tidaknya pengembangan sektor pertanian di suatu daerah bergantung pada kondisi sektor pertanian di daerah tersebut.

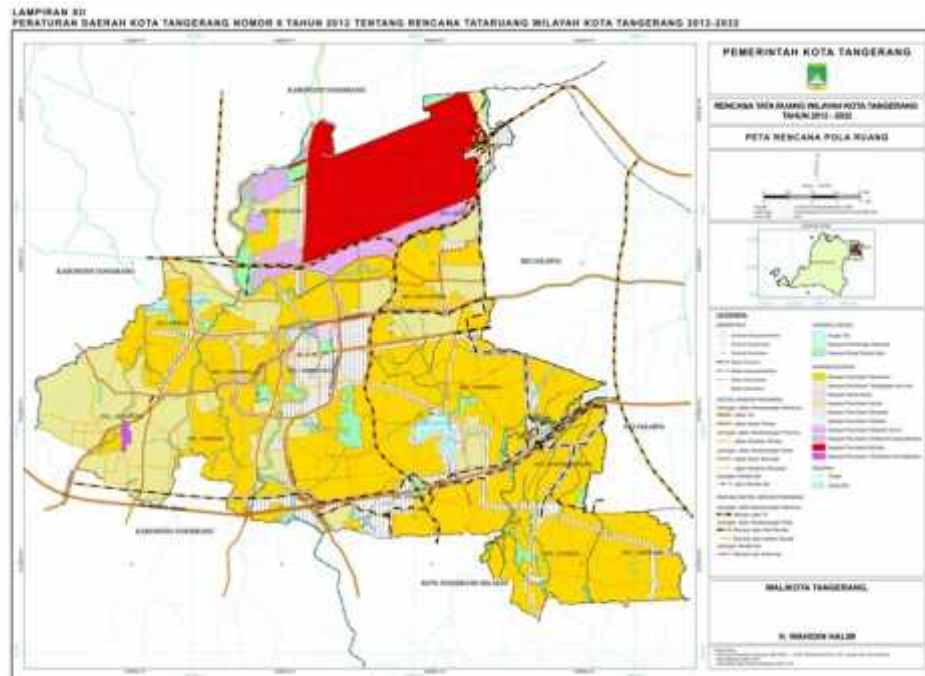
Melihat potensi sektor pertanian yang semakin berkurang seiring waktu karena berkurangnya lahan pertanian aktif akibat alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah Kota Tangerang kemudian menitikberatkan pengembangan sektor pertanian pada konsep pertanian perkotaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *urban farming*. *Urban farming* atau pertanian perkotaan sendiri dapat didefinisikan sebagai aktifitas budidaya tanaman yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan. Termasuk didalamnya pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk hasil budidaya. Tak jarang, *urban farming* juga mencakup kegiatan pemeliharaan hewan ternak. Kegiatan ini memiliki perspektif ekonomi, lingkungan, dan akses terhadap bahan pangan yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang termasuk didalamnya menjabarkan mengenai permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Tangerang dan mengatur pengembangan pertanian perkotaan atau *urban farming* di wilayah Kota Tangerang sebagai alternatif kebijakan dalam menanggulangi permasalahan pada penyelenggaraan urusan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang kemudian mencanangkan Program Tangerang Berkebun yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya dan bertujuan

untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan lahan terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Kota Tangerang.

Program Tangerang Berkebun dicanangkan untuk diimplementasikan pada tingkat kota atau tersebar di seluruh wilayah kecamatan/kelurahan di Kota Tangerang, tetapi dalam arahan pemanfaatan ruang/indikasi program pada Rencana Pola Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kota Tangerang Tahun 2014-2019 yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 menunjukkan lokasi untuk mengembangkan kegiatan budidaya hortikultura tanaman berada di wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

**Gambar 1.1**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Tangerang 2012-2032**



(Sumber: Lampiran Pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2032)

Namun dalam proses pengimplementasiannya, Program Tangerang Berkebun tidak langsung diterapkan di wilayah Kecamatan Pinang maupun Kecamatan Karang Tengah. Program yang berjalan sejak 2014 ini, awalnya diimplementasikan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Karawaci, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batuceper, dan Kecamatan Cipondoh. Penetapan 4 wilayah kecamatan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Tangerang Berkebun yang memenuhi kriteria sebagai CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi). Setelah melihat kesuksesan penerapan program tersebut di 4 wilayah kecamatan, implementasinya dilanjutkan di wilayah kecamatan lainnya termasuk di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

Selain menyesuaikan arahan pemanfaatan ruang/indikasi program, penerapan Program Tangerang Berkebun di wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah ini menyesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Diketahui bahwa di wilayah Kecamatan Pinang memang dikenal sebagai kawasan budidaya buah-buahan, diantaranya Belimbing, Melon Emas, Jambu Merah, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah Kecamatan Karang Tengah sudah berkembang usaha budidaya tanaman hias sejak tahun 1970-an.

Diterapkannya Program Tangerang Berkebun akan menjadi salah satu cara mengoptimalisasikan pemanfaatan lahan terbatas untuk pengembangan sektor pertanian. Masyarakat terutama para petani diharapkan dapat melanjutkan serta mengembangkan kegiatan budidaya tanaman dengan cara yang lebih modern dengan menyesuaikan kondisi ruang wilayah perkotaan. Tidak hanya bermanfaat

untuk memenuhi gizi keluarga, program ini akan menjadi alternatif tambahan pendapatan masyarakat dan memungkinkan menjadi alternatif wisata baru di Kota Tangerang berbasis pertanian yang masih jarang ditemui di wilayah perkotaan.

Berdasarkan penelitian awal peneliti, permasalahan yang menjadi kendala dalam implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Program Tangerang Berkebun tidak melibatkan petani setempat. Dalam proses implementasi Program Tangerang Berkebun yang menjadi sasaran program adalah masyarakat Kota Tangerang. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut lebih berfokus pada ibu-ibu rumah tangga. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, sasaran dari Program Tangerang Berkebun menyesuaikan dengan tujuan adanya Program Tangerang Berkebun, yaitu untuk pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, adanya Program Tangerang Berkebun diharapkan dapat menjadi alternatif kegiatan positif yang dapat dilakukan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dan memberikan kontribusi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta menjadi sarana komunikasi sosial bagi masyarakat dan menambah nilai ekologis.

Sayangnya, kegiatan ini tidak melibatkan petani setempat yang sudah puluhan tahun menggeluti profesi sebagai petani. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya yang mengetahui adanya Program Tangerang Berkebun dan sangat mengapresiasi program tersebut sebab

memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Namun, beliau menyayangkan jika para petani yang sudah lebih dulu menggeluti kegiatan budidaya tanaman tidak dilibatkan.

Saat ini masyarakat yang masih berprofesi sebagai petani banyak mengalami kesulitan. Selain keterbatasan lahan, keterbatasan sarana karena biaya yang mahal menjadi salah satu alasan kegiatan budidaya tanaman semakin berkurang. Akhirnya, banyak masyarakat yang meninggalkan profesi petani karena dianggap memakan biaya yang besar dan sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Menurut Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya, jika para petani dilibatkan dalam Program Tangerang Berkebun, petani akan sangat terbantu dalam hal penyediaan sarana pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, dan lain-lain sehingga mengurangi pembiayaan pada kegiatan budidaya tanaman.

Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur menambahkan, jika dalam Program Tangerang Berkebun para petani dapat dilibatkan untuk membantu membina masyarakat dalam kegiatan budidaya tanaman. Sebab mereka sudah memahami tata cara bercocok tanam atau pembudidayaan tanaman dari pengalaman mereka yang sudah berkecimpung di dunia pertanian selama puluhan tahun. Selain itu, dengan ikut serta dalam Program Tangerang Berkebun para petani dapat membantu menjaga

keberlangsungan sektor pertanian di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

*Kedua*, waktu pembinaan untuk masyarakat pada Program Tangerang Berkebun yang cukup singkat. Kegiatan budidaya tanaman merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan agar mendapatkan hasil yang maksimal, menyesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Untuk menjalankan kegiatan budidaya tanaman pun tidak bisa sembarangan. Harus dilakukan dengan tekun dan mempelajari berbagai macam hal yang berkaitan dengan tanaman dari mulai menanam bibit, perawatannya, hingga cara panen agar hasil budidaya yang didapatkan baik dan sempurna.

Program Tangerang Berkebun memiliki periode selama 1 tahun untuk dilaksanakan di 100 titik lokasi yang berbeda. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembinaan masyarakat untuk mempelajari ilmu mengenai tanaman dan pembudidayaannya hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, sosialisasi berupa bimbingan teknis dan yang kedua, langsung pada tahapan praktik di lapangan. Setelahnya, masyarakat diharapkan mampu mempelajari sendiri sebagaimana telah disampaikan pada saat sosialisasi maupun praktik langsung di lapangan dengan dibantu oleh pembimbing yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Beliau mengatakan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat memang tidak sepenuhnya dilakukan dalam bentuk sosialisasi tetapi lebih banyak dilakukan



bersamaan dengan praktik dilapangan sehingga masyarakat lebih mudah memahami proses budidaya tanaman yang diajarkan.

Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang mengatakan bahwa proses pembinaan yang cukup singkat pada awalnya menyulitkan masyarakat untuk melanjutkan kegiatan budidaya tanaman karena tahapan yang cukup banyak harus dilakukan pada proses budidaya tanaman. Apalagi pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan praktik di lapangan bukanlah hal yang mudah. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah sulitnya menyesuaikan waktu dengan pembimbing untuk bertemu dan mempelajari lebih dalam mengenai proses budidaya tanaman.

Kemudahan dalam mengakses informasi menggunakan teknologi, nyatanya belum benar-benar membantu masyarakat. Keterbatasan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi menjadi hambatan lainnya, sehingga untuk mempelajari proses budidaya tanaman tanpa bantuan pembimbing menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Menurut Ketua Kelompok Tani Kelurahan Parung Jaya, ibu rumah tangga yang kebanyakan sudah tidak berusia muda memang tidak terbiasa menggunakan teknologi selain untuk berkomunikasi. Menggunakan teknologi untuk mempelajari proses budidaya tanaman justru akan memakan waktu karena mereka harus memahami penggunaan teknologi terlebih dahulu.

*Ketiga*, kurangnya minat dan motivasi masyarakat pada kegiatan budidaya tanaman. Kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis dan cepat, membuat masyarakat perkotaan cenderung berorientasi pada hal-hal yang bersifat realistik

yang mampu memberikan hasil yang nyata. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat perkotaan yang hanya berfokus pada kehidupan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak jarang masyarakat perkotaan tidak mengetahui perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin cepat, membuat wilayah perkotaan menjadi semakin padat. Pengembangan sektor pertanian atau perkebunan pun semakin berkurang karena lahan hijau banyak yang kemudian beralih fungsi menjadi gedung perkantoran maupun kawasan perumahan *elite* untuk masyarakat kelas menengah atas. Keberadaan petani lokal pun terdesak dengan hiruk pikik perkembangan kota. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab semakin berkurangnya profesi petani di wilayah perkotaan. Profesi petani dianggap pekerjaan yang tidak berkelas dan tidak bisa menghasilkan untuk mencukupi kehidupan mereka di kota.

Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mengatakan sifat masyarakat perkotaan yang cenderung menyenangi hal-hal modern dan mudah membuat masyarakat enggan untuk ikut serta dalam kegiatan budidaya tanaman yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, masyarakat perkotaan saat ini belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan lingkungan sekitarnya karena menganggap hal tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Padahal jika mereka ikut serta dalam Program Tangerang Berkebun, mereka akan melihat perubahan yang nyata pada lingkungan tempat tinggal mereka. Seiring waktu, lingkungan menjadi lebih asri

dan bersih. Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya pun menambahkan jika masyarakat banyak yang menganggap Program Tangerang Berkebun ini hanya membuang waktu dan masih banyak hal lain yang lebih utama untuk dilakukan, terutama oleh ibu rumah tangga, seperti membersihkan rumah atau memasak.

*Keempat*, kurangnya keterlibatan kaum muda pada Program Tangerang Berkebun. Dewasa ini, banyak bermunculan komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang digagas oleh kaum muda sebagai bentuk nyata dari keseriusan mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan dan melakukan perubahan yang nyata bagi lingkungannya. Dibentuknya komunitas-komunitas tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat serta memotivasi masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Sayangnya, hal ini belum banyak berpengaruh terhadap masyarakat. Sikap acuh dan anggapan bahwa kebersihan lingkungan adalah sepenuhnya tanggung jawab petugas pembersih lingkungan masih sangat lekat dengan masyarakat perkotaan.

Keberadaan komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang ada saat ini pun ternyata belum dimanfaatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mengatakan bahwa lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan *outcome* dari Program Tangerang Berkebun, bukan merupakan fokus utama. Fokus utama dari program tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, yang artinya tujuan dari Program Tangerang Berkebun akan sesuai bila

sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga. Itu sebabnya pemerintah belum melibatkan secara langsung melibatkan kaum muda maupun komunitas-komunitas pecinta lingkungan untuk membantu dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun.

Kebanyakan kaum muda maupun komunitas-komunitas pecinta lingkungan pun tidak mengetahui adanya Program Tangerang Berkebun. Padahal keterlibatan kaum muda maupun komunitas-komunitas pecinta lingkungan akan sangat membantu dalam penerapan program tersebut. Mereka dapat menjadi pendamping dan ikut menerapkan konsep *urban farming* di lingkungan tempat tinggalnya. Program Tangerang Berkebun pun akan semakin dikenal luas dan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan kegiatan budidaya tanaman.

Berdasarkan uraian masalah-masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan mengambil judul **“Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Program Tangerang Berkebun tidak melibatkan petani setempat;
2. Waktu pembinaan untuk masyarakat pada Program Tangerang Berkebun cukup singkat;
3. Kurangnya minat dan motivasi masyarakat pada kegiatan budidaya tanaman; dan
4. Kurangnya keterlibatan kaum muda pada Program Tangerang Berkebun.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar peneliti lebih fokus terhadap permasalahan secara mendalam dan terperinci sehingga tidak bias dalam penjabaran data-data yang peneliti gunakan. Dalam hal ini peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang difokuskan pada **“Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah”**.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang difokuskan oleh peneliti adalah:

Bagaimana implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian “Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah”, adalah:

Untuk mengetahui hasil implementasi dari Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, guna menjaga potensi ekstinsing sektor pertanian di wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Untuk menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan terkait pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya pada teori kebijakan, perencanaan serta pengembangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan pertanian perkotaan melalui Program Tangerang Berkebun.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah daerah Kota Tangerang dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD Kota Tangerang, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui masukan yang bersifat membangun guna mengetahui hasil kerja pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang sudah disahkan selama kurun waktu tertentu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas kerja para pegawai SKPD, dapat menjadi acuan dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan yang belum terealisasi dalam kurun waktu tertentu, dapat menjadi penggerak untuk semakin aktif bekerja sama dengan masyarakat agar mampu mengembangkan serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan daerah di tiap wilayah melalui kegiatan pengembangan potensi ekstinsing di tiap-tiap wilayah.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala yang terjadi. Proporsi-proporsi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian yang dilakukan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Seperti yang ditanyakan oleh Kerlinger dalam Sugiyono (2011:52).

*“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proporsisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Maka



dari itu, peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **2.1.1 Konsep Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah “kebijakan atau *“policy”*” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Jones dalam Winarno (2014:19), istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*desicions*), *standard*, proposal, dan *grand design*.

Kebijakan dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang harus diikuti oleh unsur pengaturan dan/atau paksaan, sehingga pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:6) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Richard Rose dalam Winarno (2014:20), seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai:

“Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa kebijakan merupakan arah atau pola kegiatan dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya banyak definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat.

Eyestone dalam Wahab (2012:13), merumuskan kebijakan publik secara singkat, bahwa kebijakan publik adalah “*the relationship of government unit to its environment*” (hubungan yang berlangsung antar suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Wilson dalam Wahab (2012:13) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut.

*“The actions, objectives, and pronouncements of government on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen).”*

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa segala tindakan yang diambil atau gagal diambil oleh pemerintah untuk diimplementasikan dan penjelasan yang diberikan pemerintah mengenai hal-hal yang terjadi dan tidak terjadi dapat disebut sebagai kebijakan publik. Namun pernyataan ini dianggap terlalu luas karena mencakup banyak hal. Sejalan dengan Wilson, Dye dalam Winarno (2014:20), berpendapat bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”. Definisi tersebut memberikan arti kebijakan publik sebagai apa saja yang ingin lakukan pemerintah dan yang tidak ingin dilakukan pemerintah.

Anderson dalam Nugroho (2011:93), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah:

*“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”*

Peterson dalam Nugroho (2011:93), mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“government action to address some problem”*. Menurutnya, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah. Berbeda dengan Peterson, Friedrich dalam Nugroho (2011:93) yang menyatakan kebijakan publik sebagai:

*“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”*

Menurut Friedrich, kebijakan publik tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang tidak harus dilakukan pemerintah tetapi memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan langkah pemerintah dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan peluang dan ancaman yang akan terjadi saat ini dan dikemudian hari.

Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2011:4), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesign untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Peters dalam Nugroho (2011:93), menambahkan definisi kebijakan publik ialah sebagai berikut.

*“The sum of governments activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.”*

Definisi lain diungkapkan oleh Anderson dalam Agustino (2008:7) yang memberikan pengertian atas kebijakan publik sebagai:

*“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”*

Jenkins dalam Wahab (2012:15), seorang pakar Inggris merumuskan kebijakan publik sebagai berikut.

*“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.”*

Seorang pakar Nigeria, Udoji dalam Wahab (2012:15), mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

*“An santioned course of action addressed to a particular problem or group of related problem that affect society at large.”*

Beliau mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Hal ini kemudian menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya sebuah teori atau tindakan yang semata-mata dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa memperhatikan sanksi apabila penerapan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan arahan serta maksud dari pembuatan kebijakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif, yaitu melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan dan berbentuk negatif, yaitu melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun. *Kelima*, kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. (Agustino, 2008:8)

### **2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Tahap lanjutan dari perumusan kebijakan oleh para pembuat kebijakan atau “*policy makers*” adalah pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam arti sempit, implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan suatu kebijakan dan

menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kebijakan (*stakeholders*), aktor politik, organisasi (baik publik maupun privat), prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu sesuai dengan yang dikehendaki.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pengimplementasiannya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono, 2012:87)

Menurut Ripley dan Frankin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Merilee S. Grindle dalam Winarno (2012:149) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu,

tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Eugene Bardach dalam Agustino (2008:138), seorang ahli kebijakan mengemukakan kerumitan dalam proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien.”

Pendapat dalam derajat lain dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Berdasarkan tiga definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut pada tiga hal, yaitu: (i) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (ii) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan kebijakan; dan (iii) adanya hasil kegiatan kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap, dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Berdasarkan beberapa konsep mengenai implementasi dari beberapa ahli di atas, peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah langkah lanjutan dalam proses kebijakan setelah kebijakan ditetapkan, yang didalamnya terdapat aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat tahapan-tahapan implementasi kebijakan yang membutuhkan kemampuan dari pihak pelaksana kebijakan agar hasil yang



diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari kebijakan itu sendiri.

### **2.1.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart, istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando), yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Agustino, 2008:140).

#### **2.1.3.1 Pendekatan *Top Down***

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat (Agustino, 2008:140).

### **2.1.3.2 Pendekatan *Bottom Up***

Pendekatan *bottom up* memandang bahwa implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Melainkan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontra-produktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008:156).

### **2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dibawah ini akan diuraikan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh empat tokoh yang berpengaruh dalam studi implementasi kebijakan dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka kemukakan.

#### **2.1.4.1 Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn**

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja publik.

Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut diantaranya:

##### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Menurut van Meter dan van Horn, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila

standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Wahab, 2012:99).

## 2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi

kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama.

#### 4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan diambil secara top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan masyarakat.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

#### 6. Lingkungan Eksternal (Ekonomi, Sosial, dan Politik)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

#### **2.1.4.2 Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III**

George C. Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
3. Disposisi, berkenaan dengan *kesediaan* dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan oleh Edward III.

#### **2.1.4.3 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle**

Dikemukakan oleh Wibawa (1994: 22), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat

implementasinya dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut. (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) Derajat perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan pembuat kebijakan; (5) (Siapa) pelaksana program; dan (6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga dan penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Namun demikian, jika kita mencermati model Grindle, kita dapat memahami bahwa keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

#### **2.1.4.4 Implementasi Kebijakan Publik Model Mazmanian dan Sabatier**

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut sebagai model *Kerangka Analisis*



*Implementasi* yang mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

*Pertama*, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

*Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

*Ketiga*, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan—pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksanaan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

### 2.1.5 Deskripsi Program Tangerang Berkebun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tangerang serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan pada Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan mempunyai tugas:

1. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman produk pangan; dan
2. Melakukan pembinaan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang.

Untuk memenuhi tugasnya, Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan pada Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang kemudian membuat dan menjalankan Program Tangerang Berkebun. Program Tangerang Berkebun adalah program yang mendukung pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*) dengan sasaran masyarakat Kota Tangerang, khususnya ibu rumah tangga. Program ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong minat masyarakat dalam menanam sendiri (*grow your own*) baik tanaman pangan maupun hortikultura;
2. Menyediakan pangan segar dan sehat untuk di konsumsi karena budidaya tanaman dianjurkan secara organik;
3. Memberikan kontribusi ekonomi bagi pelaku usaha karena pangan merupakan kebutuhan primer dan memiliki nilai jual;
4. Sebagai sarana komunikasi sosial antar anggota keluarga dan masyarakat; dan
5. Memberikan nilai tambah secara ekologis seperti penghasil oksigen, pembersih udara, mengurangi pemanasan udara, mengurangi timbunan sampah dan barang bekas.

Selanjutnya, standar pelaksanaan Program Tangerang Berkebun terdiri dari:

1. Sosialisasi

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai menarik minat masyarakat untuk berkebun/bertani dan pembagian tanaman sayuran kepada posyandu di 104 kelurahan se-Kota Tangerang.

2. Bimbingan Teknis.

Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang motivasi dan materi, baik itu budidaya tanaman juga mengenai gizi keluarga secara Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Pada kegiatan ini peserta diberikan materi pengenalan berbagai jenis tanaman dan teknik budidaya tanaman mulai dari pengolahan tanah, pemupukan, cara bertanam, pemeliharaan tanaman dan panen (*on farm*) juga pengolahan pangan berbasis

sumber daya lokal (*off farm*). Peserta berasal dari masyarakat/kader yang berminat dan berpotensi dalam bertanam. Setiap lokasi dikelola oleh 5 orang pada awalnya sebagai perintis. Diharapkan perintis ini dapat mengajak masyarakat sekitar untuk ikut bertanam sehingga Tangerang Berkebun ini bisa berkelanjutan.

### 3. Temu Teknis.

Program Tangerang Berkebun ditetapkan di 100 lokasi se-Kota Tangerang. Pada kegiatan ini peserta diberikan materi singkat yang sama dengan materi pembekalan untuk mengingatkan kembali. Diskusi serta tanya jawab langsung dilakukan di lapangan dengan metode *learning by doing* yang berkaitan langsung dengan teknik budidaya tanaman serta penanganan penyakit. Setelah itu dilanjutkan praktek langsung penanaman benih tanaman.

Ada pula kegiatan temu teknis yang dilakukan di 2 lokasi P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera). Kegiatan ini difokuskan untuk lokasi yang terpilih untuk penilaian P2WKSS. Peserta merupakan kader posyandu/PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sebanyak 15 orang/kelompok/lokasi. Tujuan temu teknis ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam teknik budidaya tanaman sehingga bisa bertanam dengan baik di kebun percontohan P2WKSS. Hasilnya untuk memenuhi pangan keluarga dan dapat diolah menjadi pangan yang beragam.

#### 4. Panen Bersama.

Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi Tangerang Berkebun dengan melibatkan Walikota Tangerang beserta jajarannya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya serupa dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Meskipun lokus dan masalah penelitian yang diteliti tidak sama persis, tetapi penelitian-penelitian tersebut sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang peneliti anggap relevan fokus penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sleman (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman) oleh Michael Lega, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencapai kedaulatan ketahanan pangan dan efektifitas kebijakan pangan yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses implementasi tersebut serta

solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala yang ada. Menurut penelitian tersebut, masalah-masalah yang muncul adalah kurangnya sumberdaya keuangan, sumberdaya alam dan lahan budidaya pertanian semakin terbatas dan perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan penurunan produksi beberapa tanaman pangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sleman (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman) yang dilakukan oleh dinas terkait belum cukup baik. Hal ini terbukti dari masih terdapat beberapa masalah pada proses implementasi kebijakan tersebut.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas persoalan terkait ketahanan pangan. Peneliti tertarik untuk membahas topik ini karena melihat pentingnya ketahanan pangan bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan perekonomian daerah. Selanjutnya, dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan untuk meneliti kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman yang pada kenyataannya belum berjalan dengan cukup baik. Peneliti pun tertarik untuk membahas implementasi Program Tangerang Berkebun yang bertujuan untuk menangani permasalahan ketahanan pangan di Kota Tangerang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang sama, yaitu teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya menggunakan metodologi kualitatif yang digunakan untuk

menjabarkan permasalahan-permasalahan pada implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman yang belum berjalan dengan baik. Maka peneliti pun tertarik untuk mengetahui seperti apa implementasi Program Tangerang Berkebun dan akan menganalisisnya menggunakan metodologi yang sama, yaitu secara kualitatif.

Selanjutnya, perbedaan penelitian terletak pada lokus dan fokus penelitian. Peneliti sebelumnya memilih lokus di Kabupaten Sleman sedangkan peneliti saat ini memilih lokus penelitian di Kota Tangerang yang merupakan lokasi tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk fokus penelitian, peneliti terdahulu fokus terhadap Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman. Sedangkan peneliti saat ini berusaha menggambarkan seberapa baik pelaksanaan pertanian perkotaan (*urban farming*) dan lebih memfokuskan pada implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

*Kedua*, Skripsi berjudul Evaluasi Implementasi Program *Urban Farming* Oleh Dinas Pertanian Di Kota Surabaya oleh Vika Jessy Sihgiyanti, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program *Urban Farming* di Kota Surabaya oleh Dinas Pertanian dalam menegakkan kemiskinan melalui kemandirian pangan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketertarikan peneliti terhadap pengembangan kebijakan *Urban Farming* yang

tetap berjalan meskipun keterbatasan lahan menjadi salah satu masalah di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa implemetasi kebijakan Urban Farming di Kota Surabaya sudah bisa dikatakan berhasil karena faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini, yaitu mengatasi kemiskinan, keterbatasan lahan, dan ketergantungan pangan dapat diatasi. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang mengatakan bahwa banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini, baik manfaat finansial maupun manfaat lainnya. Namun perlu adanya koreksi kembali terhadap fasilitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan seperti penyuluhan lebih ditingkatkan kembali, kualitas bibit yang lebih baik lahi, kualitas penunjang kegiatan lainnya juga perlu diperbaiki kembali seperti terpal.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas persoalan terkait pengembangan konsep *Urban Farming* (pertanian perkotaan). Peneliti tertarik untuk membahas topik ini karena kebijakan *Urban Farming* dilahirkan guna mengetaskan kemiskinan melalui kemandirian pangan. Selanjutnya, dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan untuk meneliti kebijakan *Urban Farming* di Kota Surabaya yang berjalan dengan cukup baik. Peneliti pun tertarik untuk membahas implementasi Program Tangerang Berkebun yang sama-sama membahas mengenai pengembangan konsep *Urban Farming* dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang sama, yaitu



teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Selain itu, pada penelitian ini terdapat kesamaan metodologi yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada lokus penelitian, yaitu peneliti sebelumnya dilakukan di Kota Surabaya, sedangkan peneliti saat ini dilakukan di Kota Tangerang.

### **2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan dan hasil penelitian yang relevan yang kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dasar yang dapat digunakan untuk merumuskan sebuah hipotesis.

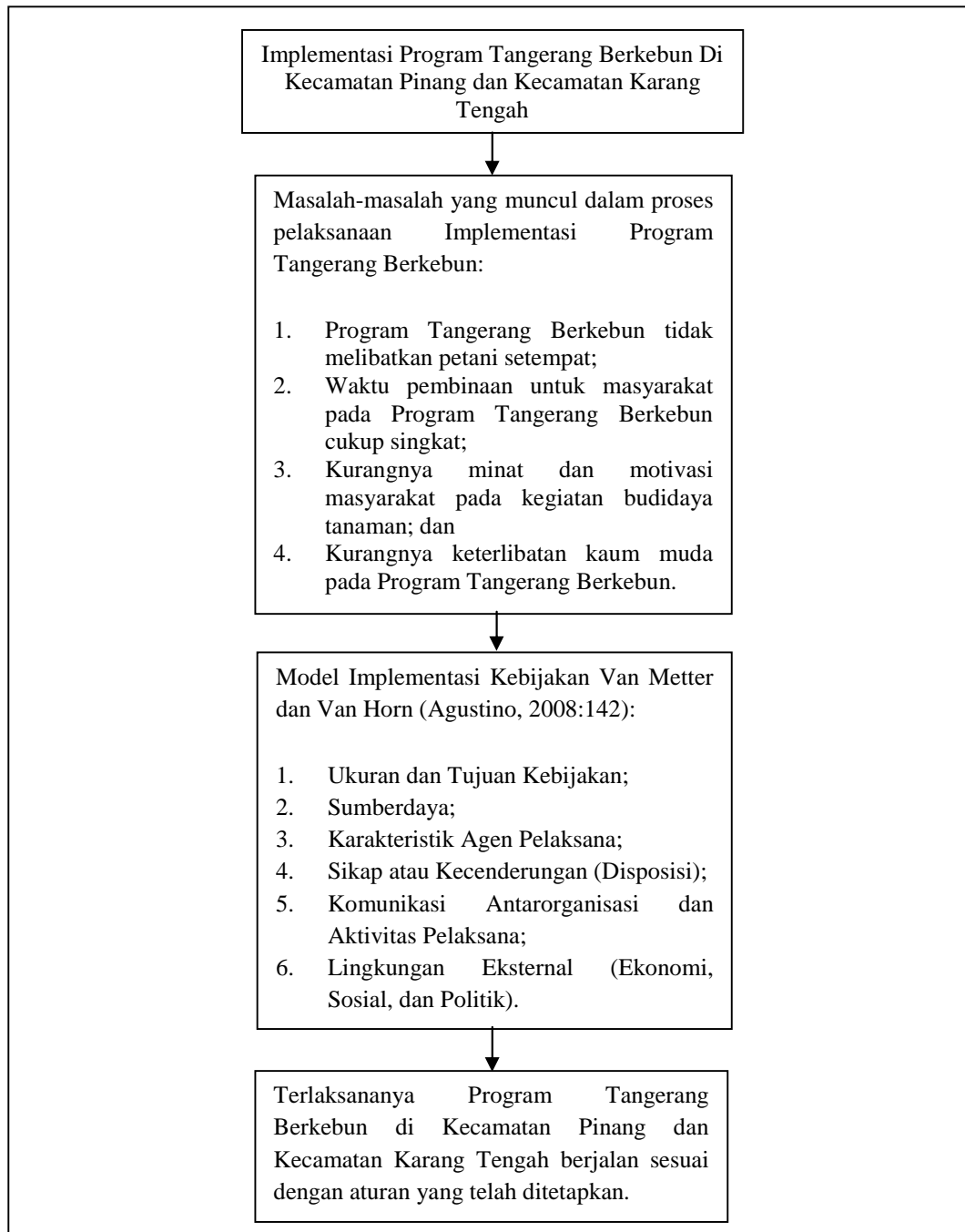
Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan Program Tangerang Berkebun. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn, karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang akan dijabarkan dalam teori tersebut.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi)
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Eksternal (Ekonomi, Sosial, dan Politik)

Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Tangerang dengan SKPD yang tugas dan fungsinya relevan terkait permasalahan pariwisata dan pertanian, Organisasi/Forum/Lembaga yang sesuai dengan fokus penelitian ini dan masyarakat Kota Tangerang khususnya yang mengikuti Program Tangerang Berkebun. Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



(Sumber: Peneliti, 2018)

## **2.4 Asumsi Dasar Peneliti**

Setelah peneliti menjelaskan permasalahan penelitian pada bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti perlu memberikan asumsi dasar yang kuat tentang kedudukan permasalahannya. Asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasar berpikir karena dianggap benar sedangkan mengasumsikan berarti menduga, memperkirakan, memperhitungkan, atau meramalkan. Maka dalam penelitian mengenai Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari munculnya permasalahan-permasalahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:3), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya dalam pengertian yang luas, Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena mengenai Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang

secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

### **3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian**

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2013:97). Fokus atau ruang lingkup penelitian merupakan alat untuk membatasi studi penelitian yang dilakukan peneliti guna mendapatkan data yang lebih akurat dan tegas. Sehingga peneliti dapat lebih terarah dalam melakukan penelitian di lapangan. Adapun fokus atau ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Program Tangerang Berkebun.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang. Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang diundangkan pada 27 Februari 1993 dan diresmikan menjadi Kota Tangerang pada 28 Februari 1993. Namun pada tahun 2000 Provinsi Jawa Barat mengalami pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten. Berdasarkan undang-undang tersebut, beberapa wilayah paling barat dari pulau Jawa kemudian

menjadi bagian dari Provinsi Banten termasuk Kota Tangerang. Kota Tangerang merupakan salah satu kota penyangga ibukota, sebab berbatasan langsung dengan wilayah ibukota Jakarta di sebelah timur dan selatan. Secara administratif total luas wilayah Kota Tangerang berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kota Tangerang sekitar 164,753 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut terbagi atas 13 kecamatan, diantaranya Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Periuk, Kecamatan Benda, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Neglasari.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada lingkup yang lebih sempit, yaitu pada tingkatan kecamatan yang dilakukan Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Hal ini didasari oleh pengalaman yang dialami oleh peneliti selama bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pinang. Penelitian ini dilakukan pula di wilayah Kecamatan Karang Tengah karena berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, kegiatan budidaya tanaman tidak hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Pinang saja tetapi juga dilakukan di wilayah Kecamatan Karang Tengah.

### **3.4 Fenomena yang Diamati**

Foltz (dalam Satori dan Komariah 2010:49) mengatakan siapa atau apa yang dipelajari dinamakan *unit of analysis*. *Unit of analysis* merupakan unit atau elemen yang dianalisis atau dipelajari yang darinya ingin diketahui atau

sejumlah hal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti baik berupa orang atau apapun yang dapat dipelajari dan menghasilkan informasi tentang berbagai macam hal, untuk kemudian ditarik kesimpulan ketika penelitian telah selesai dilakukan.

### **3.4.1 Definisi Konsep**

Definisi konsep ialah abstraksi atau gejala dari fenomena yang akan diteliti yang kemudian akan dijelaskan menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Publik dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Agustino, 2008:142) yang berisi tentang enam dimensi pokok dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, yakni terdapat (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikapkecenderungan (disposisi) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi, serta (6) Lingkungan eksternal.

### **3.4.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan



definisi operasional ini akan dikemukakan indikator-indikator penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu enam variabel menurut teori Van Metter dan Van Horn yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
  - a. Standar dan sasaran kebijakan, yakni mengenai standar keberhasilan kebijakan dan siapa sasaran dari kebijakan tersebut serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi masyarakat.
  - b. Tujuan kebijakan, yakni mengenai tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Sumberdaya
  - a. Dukungan sumber daya manusia, yakni mengenai jumlah implementor serta kinerja para implementor dalam mencapai tujuan kebijakan.
  - b. Dukungan sumber daya finansial, yakni mengenai kondisi keuangan dari implementasi kebijakan tersebut.
  - c. Dukungan sumber daya sarana dan prasarana, yakni mengenai kondisi sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh implementor kepada masyarakat dan kesesuaian sarana dan prasarana yang diberikan oleh implementor dalam menunjang proses pencapaian tujuan kebijakan.
  - d. Dukungan sumber daya waktu, yakni mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
  - a. Karakteristik/Peran, yakni mengenai peran serta masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- b. *Standard Operating Procedure (SOP)*, yakni mengenai standar tata cara pengoperasian yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - c. Sanksi, yakni mengenai bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pelaksana
- a. Kognisi implementor, yakni mengenai pemahaman para *stakeholder* sebagai implementor dalam pelaksanaan kebijakan.
  - b. Respon implementor, yakni mengenai dukungan serta persetujuan para implementor.
5. Komunikasi Antar Organisasi
- a. Koordinasi, yakni mengenai bentuk koordinasi yang terjalin antara *stakeholder*, pihak-pihak yang menjalin koordinasi, dan kapan koordinasi dilakukan.
  - b. Sosialisasi, yakni mengenai bentuk sosialisasi yang dilakukan, pihak yang melakukan dan terlibat dalam sosialisasi, dan kapan sosialisasi dilakukan.
6. Lingkungan Eksternal
- a. Kondisi ekonomi, yakni mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah yang merupakan sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut.

- b. Kondisi sosial, yakni mengenai kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah yang merupakan sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut.
- c. Kondisi politik, yakni mengenai kondisi politik memengaruhi implementasi kebijakan di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah yang merupakan sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. Lincoln dan Guba dalam Satori dan Komariah (2010:62) menjelaskan bahwa manusia sebagai instrumen pengumpulan data memberikan keuntungan, dimana ia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu.

Konsep *human instrument* dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Maka dalam penelitian mengenai Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, peneliti bertindak sebagai *human instrument* dimana peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian

kualitatif “*the researcher is the key instrument*”. Jadi, peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Nasution dalam Satori dan Komariah (2010:63) mengatakan penelitian sebagai instrumen penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian;
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus;
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia;
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita;
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika;
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan perbaikan.

Peneliti dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya memiliki sensitifitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk dapat menyusuri dan menelusuri fakta-fakta dan menggali informasi dari kriteria penelitian dan dari sisi seni bergaul. Dengan demikian, peneliti sebagai instrumen penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan (Satori dan Komariah, 2010:67).

Selanjutnya, terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

### **3.5.1 Sumber Data Penelitian**

Bila dilihat dari sumber datanya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (peneliti). Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer ini diperoleh dari informan penelitian melalui kegiatan wawancara maupun observasi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti jurnal ilmiah, artikel, literatur, laporan, serta berbagai situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai sumber. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan melakukan wawancara, observasi/pengamatan, studi dokumentasi serta penelusuran data secara *online*.

#### 1. Wawancara/Interview

Wawancara/interview adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*) (Sudjana dalam Satori dan Komariah, 2010:130). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informasi lebih mendalam sebab subjek yang menjadi informan adalah

informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi secara menyeluruh dan jelas. Agar hasil wawancara terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada para informan atau sumber data, maka peneliti akan menggunakan alat bantu wawancara, seperti buku catatan, perekam suara dan kamera handphone. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan penelitian. Peneliti akan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti selama melakukan wawancara yang mudah dipahami dan selanjutnya akan dicatatkan secara lengkap dalam hasil catatan lapangan; perekam suara berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan yang terjadi selama proses wawancara berlangsung; dan kamera handphone berfungsi untuk memotret ketika peneliti melakukan proses wawancara dengan informan penelitian. Dengan adanya bukti foto yang dilampirkan, maka keabsahan penelitian akan terjamin karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.

Selanjutnya, teknik wawancara yang digunakan berupa wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012:233),

wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, dalam melakukan wawancara peneliti harus membawa instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara dan alat bantu wawancara seperti buku catatan, perekam suara dan kamera. Sedangkan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Untuk memudahkan peneliti dalam hal melakukan wawancara terstruktur (*structured interview*) maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tertuang dalam dimensi pertanyaan dibawah ini yang mana sesuai dengan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa dalam implementasi kebijakan ada 6 (enam) variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana; komunikasi antar organisasi, serta lingkungan eksternal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.



**Tabel 3.1**  
**Pedoman Wawancara**

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Informan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Sasaran Kebijakan; dan</li> <li>2. Tujuan Kebijakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi standar keberhasilan dalam implementasi Program Tangerang Berkebun?</li> <li>2. Sudah tepat sasarankah Program Tangerang Berkebun?</li> <li>3. Apakah tujuan dari Program Tangerang Berkebun?</li> <li>4. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai sesuai dengan standar keberhasilan kebijakan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang;</li> <li>2. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>3. Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.</li> <li>4. Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang;</li> <li>5. Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya.</li> </ol>
2.	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Sumber Daya Manusia;</li> <li>2. Dukungan Sumber Daya Finansial; dan</li> <li>3. Dukungan Sumber Daya Waktu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun sudah memenuhi kompetensi dan memiliki kapabilitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang telah ditetapkan?</li> <li>2. Berapakah jumlah SDM yang tersedia untuk melaksanakan Program Tangerang Berkebun?</li> <li>3. Darimanakah anggaran didapatkan? Apakah anggaran dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun sudah ada dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?</li> <li>4. Apakah sarana dan prasarana penunjang sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan? Dan bagaimana kondisi sarana prasarana tersebut?</li> <li>5. Bagaimana kesesuaian waktu dalam implementasi Program Tangerang Berkebun?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang;</li> <li>2. Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>3. Kelurahan Panunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>4. Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;</li> <li>5. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang;</li> <li>6. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggungan Timur;</li> <li>7. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya</li> <li>8. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya.</li> </ol>

3.	Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik/Peran Agen Pelaksana; dan</li> <li>2. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah karakteristik/peran para pelaksana kebijakan sudah sesuai dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun?</li> <li>2. Seperti apa standar pelaksanaan bagi para pelaksana program yang diatur dalam Program Tangerang Berkebun?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang;</li> <li>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang;</li> <li>3. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang;</li> <li>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang;</li> <li>6. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>7. Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;</li> <li>8. Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>9. Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang</li> <li>10. Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;</li> <li>11. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang;</li> <li>12. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur;</li> <li>13. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya</li> <li>14. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya.</li> </ol>
4.	Sikap/ Kecenderungan (Disposisi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kognisi implementor; dan</li> <li>2. Respon implementor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap Program Tangerang Berkebun dan pelaksanaan program yang ditugaskan kepada mereka?</li> <li>2. Bagaimana tanggapan para pelaksana program terhadap Program Tangerang Berkebun? Apakah mendukung dan setuju dengan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan ataukah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang;</li> <li>2. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>3. Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;</li> <li>4. Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;</li> <li>5. Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang</li> <li>6. Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;</li> </ol>

			sebaliknya?	7. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang; 8. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya.
5.	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	1. Koordinasi; dan 2. Sosialisasi.	1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan para pelaksana Program Tangerang Berkebun? 2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana Program Tangerang Berkebun? Siapa saja sasaran sosialisasinya?	1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang; 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang; 4. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang; 5. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Utara; 6. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya 7. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya.
6.	Lingkungan Eksternal	1. Kondisi Ekonomi; 2. Kondisi Sosial; dan 3. Kondisi Politik.	1. Apakah kondisi ekonomi daerah dan masyarakat mendukung dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun? 2. Apakah kondisi sosial wilayah dan masyarakat mendukung dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun? 3. Apakah kondisi politik di daerah dan wilayah sasaran kebijakan memengaruhi pelaksanaan Program Tangerang Berkebun?	1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang; 2. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang; 3. Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang; 4. Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang; 5. Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang; 6. Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang; 7. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang; 8. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Utara; 9. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya 10. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya.

(Sumber: Peneliti, 2018)

## 2. Observasi/Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama yang bisa dilakukan oleh peneliti. Nasution dalam

Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi memberi peluang pada peneliti untuk menggali data perilaku subjek secara luas, mampu menangkap berbagai macam interaksi, dan secara terbuka mengeksplorasi topik penelitiannya. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Sotari dan Komariah, 2010:104-105).

Teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif (*non-participant observation*), yaitu observasi yang dilakukan di mana si peneliti mengamati perilaku dari jauh tanpa ada interaksi dengan subjek yang sedang diteliti. Observasi non-partisipatif sama dengan istilah observasi biasa. Parsudi dalam Satori dan Komariah (2010:119) menyatakan bahwa dalam penelitian biasa peneliti tidak diperbolehkan terlibat dalam hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian.

### 3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan penting dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *docere*, yang berarti *mengajar*. Dalam Bahasa Inggris disebut *document* yaitu “something written or printed, to be used as a record or evidence”, atau sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.

Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir (Satori dan Komariah, 2010:146-149).

#### 4. Metode Penelusuran Data Secara *Online*

Metode penelusuran data *online* yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data/informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Bungin, 2013:158).

### **3.6 Informan Penelitian**

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Menurut Moleong (2013:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Bagi peneliti, informan

adalah orang yang membantu agar dapat menyatu dengan masyarakat setempat, terutama bagi peneliti yang belum begitu mengenal tentang sistem kehidupan, adat-istiadat dan kebudayaan setempat (Satori dan Komariah, 2010:94).

Dalam penelitian mengenai “*Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah*” ini, pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan atau nara sumber dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:218-219). Informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang ataupun pihak-pihak yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan itu sendiri berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

Pada penelitian ini, penentuan informasi dibagi menjadi dua yaitu *key informant* dan *secondary informant*. *Key informant* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informant* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3.2**

**Daftar Informan Penelitian**

No.	Informan	Kode Informan	Keterangan
I	<b>Instansi:</b>		
	a. Kepala Bidang Keanekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang	I <sub>1-1</sub>	<i>Key Informant</i>
	b. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang	I <sub>1-2</sub>	<i>Secondary Informant</i>

	c. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang	I <sub>1-3</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang	I <sub>1-4</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	e. Kepala Seksi Wasdal Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang	I <sub>1-5</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	f. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang	I <sub>1-6</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	g. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang	I <sub>1-7</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	h. Staff Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.	I <sub>1-8</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	i. Staff Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.	I <sub>1-9</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	j. Staff Kelurahan Panunggan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.	I <sub>1-10</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	k. Staff Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.	I <sub>1-11</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	l. Sekretaris Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.	I <sub>1-12</sub>	<i>Secondary Informant</i>
<b>II</b>	<b>Masyarakat:</b>		
	a. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang.	I <sub>2-1</sub>	<i>Key Informant</i>
	b. Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggan Timur, Kecamatan Pinang.	I <sub>2-2</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	c. Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah.	I <sub>2-3</sub>	<i>Secondary Informant</i>
	d. Kelompok Usaha Tani Kecamatan Karang Tengah	I <sub>2-4</sub>	<i>Key Informant</i>

(Sumber: Peneliti, 2018)

### **3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data menurut Spradley dalam Sugiyono (2012:244) adalah cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pegujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan bagian antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola. Sedangkan menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

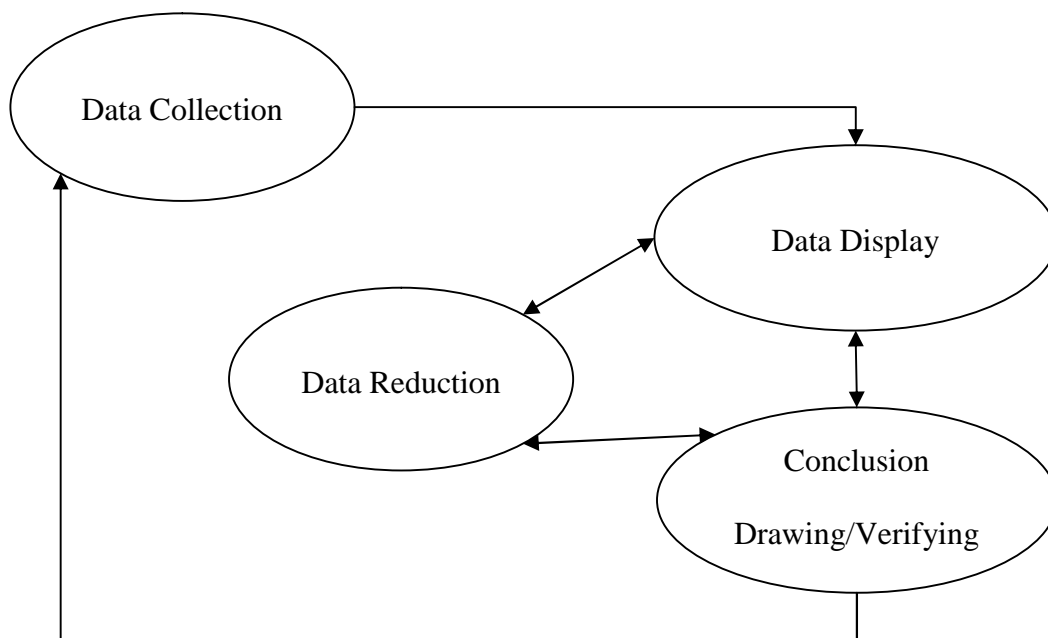
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution dalam Sugiyono (2012:245) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan penelitian. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang kemudian digunakan untuk menentukan fokus permasalahan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini, sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai data yang berkaitan dengan implementasi



kebijakan dan Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, yang mana sumbernya didapat dari tulisan berbentuk karya ilmiah seperti tesis dan skripsi serta tulisan lepas lainnya yang didapat dari media massa elektronik. Namun dalam hal ini, analisis yang dilakukan peneliti masih bersifat sementara, penelitian ini berkembang setelah peneliti berada di lapangan dan mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kemudian selama proses di lapangan, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2012:243) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu, *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Secara lebih jelas, langkah-langkah analisis ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut.

**Gambar 3.1**  
**Langkah-Langkah Analisis Data**  
**Menurut Miles dan Huberman**



(Sumber: Sugiyono, 2012: 247)

Berdasarkan Bagan 3.1 diatas, analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2012:247:253) dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. *Data Reduction*/Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat

secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 3. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah akhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek

yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **3.8 Uji Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif yang diuji adalah instrumen penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Prosedur pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode triangulasi dan mengadakan *member check*.

Menurut Moleong (2013:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sementara menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2012:273) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber; serta triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner (Sugiyono, 2012:274).

Kemudian yang dimaksud *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. (Sugiyono, 2012:276).

### **3.9 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian merupakan tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah). Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan November 2017 dan direncanakan selesai pada bulan Juli 2018.

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	2017		2018						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Bimbingan Judul									
2	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Penelitian (Bab 1-3)									
3	Seminar Proposal									
4	Revisi Proposal Penelitian									
5	Persetujuan Ke Lapangan									
6	Pengumpulan Data di Lapangan									
7	Proses Analisis Data dan Penyusunan Bab 4-5									
8	Sidang Skripsi									

(Sumber: Peneliti; 2018)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

Deskripsi obyek penelitian menggambarkan mengenai kondisi obyek penelitian secara umum yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pada lokasi penelitian, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi obyek penelitian juga menjelaskan secara umum gambaran Kota Tangerang serta gambaran umum instansi terkait yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang Dan Kecamatan Karang Tengah.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kota Tangerang**

Kota Tangerang secara astronomis terletak pada posisi  $106^{\circ}36'$  -  $106^{\circ}42'$  Bujur Timur (BT) dan  $6^{\circ}6'$  -  $6^{\circ}13'$  Lintang Selatan (LS). Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang di sebelah barat dan utara, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, dan dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur. Luas wilayah Kota Tangerang hanya sebesar 164,55 km<sup>2</sup> dengan 19,69 km<sup>2</sup> diantaranya merupakan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 1,59 persen dari luas Provinsi Banten, Kota Tangerang merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan.

Topografi Kota Tangerang secara umum berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 10-18 mdpl. Kota Tangerang memiliki 3 daerah aliran sungai, 54 saluran pembuang, 16 saluran irigrasi, dan 6 situ/danau.

Kota Tangerang yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang disahkan pada 17 Februari 1993 dan diresmikan pada 28 Februari 1993. Menjadi salah satu kota penyangga Ibukota Jakarta, Kota Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional bersama dengan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

**Gambar 4.1**  
**Peta Administratif Kota Tangerang**



(Sumber: <http://webgis.tangerangkota.go.id/>)

Pada awal pembentukannya, Kota Tangerang terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan, diantaranya Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Jatiuwung yang tercantum dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang. Pada tahun 2001, saat penyebutan "Kotamadya" berubah menjadi "Kota", dibentuk 7 kecamatan baru dan beberapa kelurahan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan induknya. Kecamatan-kecamatan baru tersebut, yaitu Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pinang, Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Periuk. Hingga saat ini, Kota Tangerang memiliki 13 wilayah kecamatan yang meliputi 104 wilayah kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Letak Kota Tangerang yang sangat strategis menjadikan pertumbuhannya cukup pesat. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, hingga tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tangerang tercatat sebanyak 2.093.706 jiwa terdiri dari 1.068.606 (51,04%) laki-laki dan 1.025.100 (48,96%) perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2016 sebesar 2,56% dan kepadatan penduduk tahun 2016 sebesar 12.274 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Tangerang pada tahun 2017 sebesar 92,84%, meningkat 0,84% dari tahun 2015. Peningkatan laju TKK di tahun 2017 diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dari 8,00% pada tahun 2015 menjadi 7,16% pada tahun 2017.

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Pinang**

Kecamatan Pinang secara administrasi merupakan bagian wilayah pemerintah kota Tangerang, dengan jumlah kelurahan terdiri dari 11 kelurahan, diantaranya Kelurahan Pinang, Kelurahan, Sudimara Pinang, Kelurahan Neroktog, Kelurahan Kunciran, Kelurahan Kunciran Indah, Kelurahan Kunciran Jaya, Kelurahan Cipete, Kelurahan Pakojan, Kelurahan Panunggangan, Kelurahan Panunggangan Utara, dan Kelurahan Panunggangan Timur.

Secara geografis, luas keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Pinang sebesar 20,6 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kecamatan Pinang hingga tahun 2016 mencapai 198.354 jiwa dengan jumlah rumah tangga 48.938 rumah tangga dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 9.629 penduduk/km<sup>2</sup>.

### **B. Gambaran Umum Kecamatan Karang Tengah**

Kecamatan Karang Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah timur Kota Tangerang dengan luas wilayah tercatat seluas 9.43 km<sup>2</sup>, dan berjarak sekitar 12 km dari titik pusat Kota Tangerang. Wilayah Kecamatan Karang Tengah terbagi menjadi 7 kelurahan, diantaranya Kelurahan Pedurenan, Kelurahan Pondok Pucung, Kelurahan Karang Tengah, Kelurahan Karang Timur, Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Parung Jaya, dan Kelurahan Pondok Bahar, dengan ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Pondok Pucung dan terdiri dari 74 rukun warga (RW) dan 361 rukun tetangga (RT).

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Karang Tengah tercatat sebesar 137.510 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 35.034 rumah tangga dan kepadatan penduduk sebesar 14.577 penduduk/km<sup>2</sup>.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang**

Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

##### **Visi**

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Melalui Penguatan Ketersediaan Pangan.”

##### **Misi**

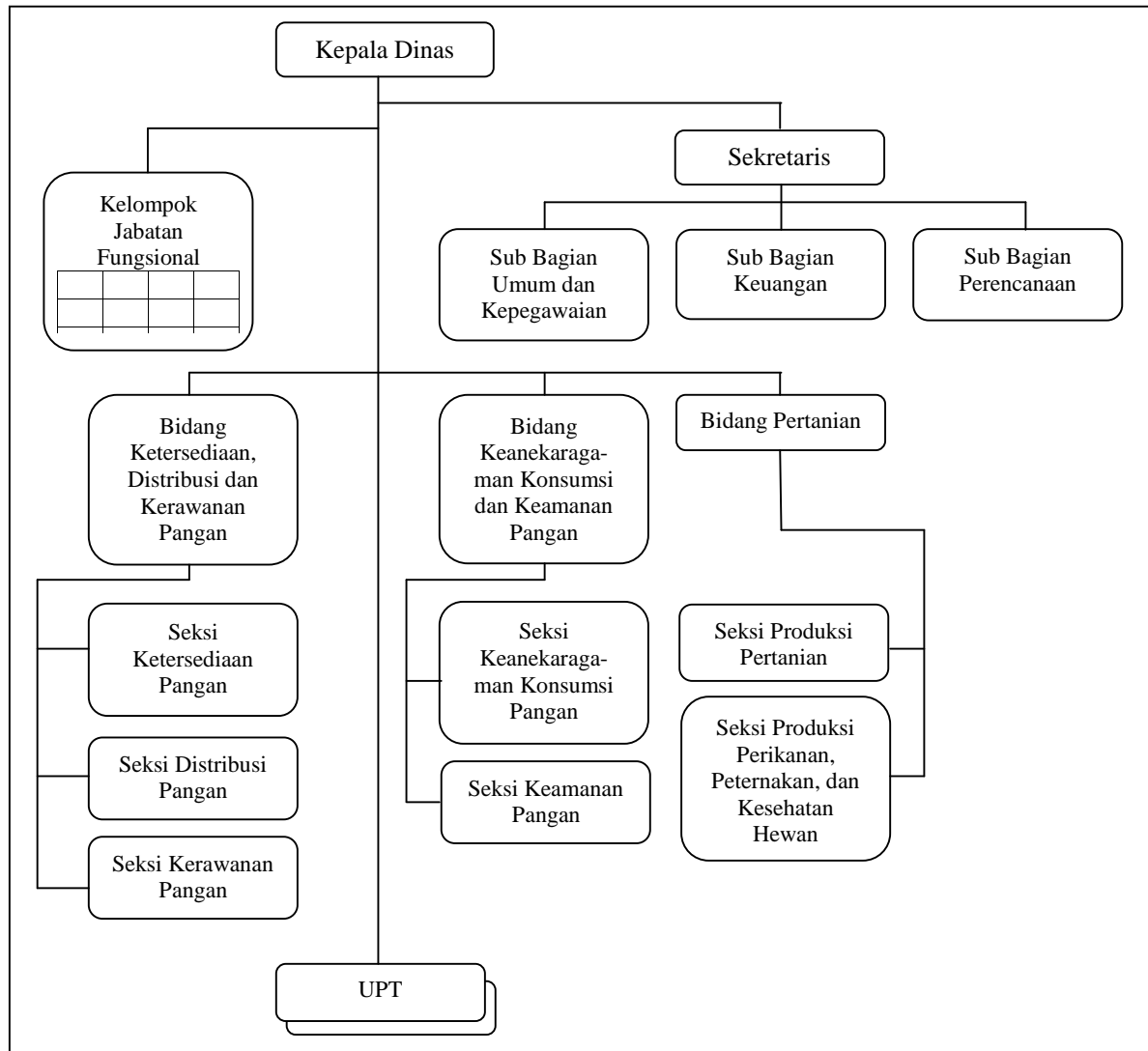
“Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah Dan Jaminan Kualitas Pangan.”

Adapun kedudukan, susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
  - b. Seksi Distribusi Pangan;
  - c. Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
  - a. Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan;
  - b. Seksi Keamanan Pangan.
5. Bidang Pertanian, membawahkan:
  - a. Seksi Produksi Pertanian;
  - b. Seksi Produksi Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagan 4.1

#### Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang



(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, 2018)

#### 4.1.2.1 Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan Pasal 3, berikut penjeasan mengenai tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang:

#### 1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang ketahanan pangan;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penatausahaan urusan umum;
- b. Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penatausahaan urusan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana Dinas;

- e. Pengoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government; dan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

## 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolanan, dan kehumasan Dinas;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- i. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
- j. Melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.3 Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:



- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
- c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
- e. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
- f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Kerawanan Pangan. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pemantapan program, pemantauan, Pengembangan dan pemantapan , evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan daerah;

- b. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pemantapan program, pemantauan, pencegahan, evaluasi dan pelaporan Distribusi pangan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pemantapan program, pemantauan, pencegahan, evaluasi dan pelaporan kerawanan pangan daerah;
- d. Pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah.
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Cadangan Pangan Daerah Dan Distribusi Pangan; dan
- f. Pelaporan.

### 3.1 Seksi Ketersediaan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkenaan dengan Penyiapan pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pemantapan program, pemantauan, pengembangan dan pemantapan, evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan. Uraian tugas Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan daerah;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan daerah dan neraca bahan makanan (NBM);

- d. melakukan pengawasan, monitoring, pemetaan serta analisis ketersediaan pangan daerah;
- e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ( PPH ) ketersediaan pangan daerah;
- f. melakukan sosialisasi dan diseminasi regulasi terkait ketersediaan pangan daerah;
- g. melakukan koordinasi dalam upaya mengamankan ketersediaan pangan daerah;
- h. melakukan koordinasi, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- k. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Cadangan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- l. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah;
- m. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan daerah;
- n. melakukan koordinasi, pengkajian, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu skala Kota;
- o. melakukan pengumpulan dan analisis informasi cadangan pangan masyarakat;
- p. melakukan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- q. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Cadangan Pangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3.2 Seksi Distribusi Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan,

pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan. Uraian tugas Seksi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan daerah;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian harga pangan strategis daerah;
- e. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian harga pangan strategis daerah;
- f. Melakukan pengumpulan dan analisis informasi distribusi pangan;
- g. Melakukan identifikasi terhadap infrastruktur distribusi pangan;
- h. Melakukan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu alat transportasi yang digunakan dalam pengangkutan serta pendistribusian pangan daerah;
- j. Melakukan pemantauan harga pangan strategis daerah;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi harga pangan strategis daerah;
- l. Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian harga pangan strategis daerah;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3.3 Seksi Kerawanan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan yang berkenaan dengan penyiapan pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pemantapan program, pemantauan, pencegahan, evaluasi dan pelaporan kerawanan pangan daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan. Uraian tugas Seksi Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan Daerah;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan daerah;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar kerawanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah (FSVA);
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan (SKPG);
- h. Melakukan pemantauan kelompok rawan pangan;
- i. Melakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengembangan, pemantauan dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- b. Pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan; dan
- c. Pelaporan.

##### 4.1 Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Uraian tugas Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pemantapan pola konsumsi, pengembangan pangan lokal serta promosi panganekaragaman pangan;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemantauan dan pemantapan polakonsumsi, pengembangan pangan lokal serta promosi panganekaragaman pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi pangan, pola pangan harapan (PPH) dan neraca bahan makanan (NBM);
- e. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi pangan dan pola pangan harapan (PPH);
- f. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
- g. Melakukan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan dan pengembangan panganekaragaman produk pangan;
- i. Melakukan koordinasi dan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
- j. Melakukan pembinaan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang;
- k. Melakukan pemantauan dan analisis mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat;
- l. Melakukan pembinaan serta fasilitasi promosi dan pemasaran bagi produk usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.2 Seksi Keamanan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan

pengoordinasian, pengkajian, penyusunan konsep kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Uraian tugas Seksi Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan;
- d. Melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- e. Melakukan analisis mutu, gizi, dan keamanan produk pangan masyarakat;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- g. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) pangan;
- h. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## 5. Bidang Pertanian

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan. Dipimpin oleh



seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan produksi usaha tani dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan upaya-upaya pengendalian hama tanaman pangan dan hortikultura, serta hama dan penyakit ikan;
- c. Penyelenggaraan upaya-upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan, tenaga dan sarana, serta pembinaan dan pengembangan kelompok tani;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- g. Pelaporan.

#### 5.1 Seksi Produksi Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian yang berkenaan dengan peningkatan produksi usaha pertanian. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian. Uraian tugas Seksi Produksi Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Pertanian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan tanaman pangan

dan hortikultura serta pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk dan pengembangan usaha pertanian;

- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi produksi dalam pembudidayaan tanaman pangan, hijauan pakan ternak dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian hama dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian hama dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan pengkajian, pembinaan, dan fasilitasi pembudidayaan jenis-jenis produk tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki nilai jual tinggi serta banyak diminati oleh masyarakat;
- g. Melakukan upaya-upaya penerapan teknologi produksi dari sejak masa sebelum panen hingga masa panen;
- h. Melakukan pengawasan, monitoring, pemetaan terkait kemungkinan serangan hama pada tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melakukan pembinaan, perencanaan, pengembangan, fasilitasi, dan pengawasan terkait upaya-upaya mekanisasi pertanian;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Pertanian; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## 5.2 Seksi Produksi Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertanian yang berkenaan dengan peningkatan produksi usaha peternakan. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian. Uraian tugas Seksi Produksi Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan

- regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
  - c. melakukan penyusunan bahan teknis perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
  - d. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan pengembangan perikanan budidaya;
  - e. melakukan pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan budidaya
  - f. melakukan pengelolaan data teknis perikanan budidaya;
  - g. melakukan pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan;
  - h. melakukan pembinaan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perikanan;
  - j. melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan serta upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
  - m. Melakukan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, serta upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
  - n. Melakukan penyiapan bahan-bahan serta melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kalangan usaha peternakan mengenai budidaya ternak, pemanfaatan lahan dan penggunaan sarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi usaha peternakan.
  - o. Melakukan pembinaan, fasilitasi, pengembangan, dan pengawasan terkait perbibitan ternak dan usaha peternakan;
  - p. Melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan serta pengembangan kelembagaan usaha peternakan dan badan-badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ternak;
  - q. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan serta mutu pelayanan pada Rumah Potong Hewan;
  - r. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Kesmavet dan Kesrawan)

- s. Melakukan pengelolaan wilayah wabah dan epidemiologi penyakit hewan;
- t. Melakukan pengawasan terhadap lalulintas perdagangan hewan;
- u. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan bidang ketahanan pangan dan pertanian yang kemudian dijalankan oleh Unit Pelaksana Terpadu (UPT) sesuai dengan UPT-UPT yang telah dibentuk, Dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk menyelenggarakan tugasnya, masing-masing UPT diberikan tugas sesuai dengan bidangnya.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 4.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sehingga data yang dihasilkan merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data kualitatif yang dihasilkan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam dengan informan penelitian, studi dokumentasi, serta metode penelusuran data online yang sesuai dengan fokus penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Selanjutnya untuk memperjelas dan memandu peneliti dalam menemukan fakta-fakta penelitian mengenai Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn, yang disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation*. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Karakteristik agen pelaksana;
- 4) Sikap/kecenderungan (disposisi);
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan
- 6) Lingkungan eksternal.

Kemudian selama proses di lapangan, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu, *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kode-kode tersebut ditentukan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan permasalahan penelitian, diantaranya:

**Tabel 4.1**  
**Kode Penelitian**

Kode	Keterangan
I <sub>1-...</sub>	Informan dari Pemerintah
I <sub>2-...</sub>	Informan dari Masyarakat

(Sumber: Peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa kode-kode penelitian yang terdiri dari pertanyaan dan informasi penelitian. Adapun kode informasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yang mana kode informan I<sub>1-1</sub>, I<sub>1-2</sub>, I<sub>1-3</sub>, I<sub>1-...</sub> merupakan kode untuk informan dari pemerintah, dan kode I<sub>2-1</sub>, I<sub>2-2</sub>, I<sub>2-3</sub>, I<sub>2-...</sub> merupakan kode untuk informan dari masyarakat. Kode informan tersebut ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam mengenali informan dalam penelitian ini.

#### 4.2.1 Deskripsi Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau orang tersebut dianggap layak dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, peneliti mencoba mendeskripsikan penjelasan tersebut pada tabel 4.2 Berikut.

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Informan Penelitian**

No.	Sektor	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan	Kode Informan
1.	P	Ibu Rika Kartika	Kepala Bidang Keanekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang	I <sub>1-1</sub>
2.	E	Bapak Ibnu Ariefyanto	Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang	I <sub>1-2</sub>

3.	M E R I N T A H	Bapak Riznur Masrun, S.T., M.T	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang	I <sub>1-3</sub>	
4.		Bapak Nurkholis, S.Ag	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang	I <sub>1-4</sub>	
5.		Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.M	Kepala Seksi Wasdal Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang	I <sub>1-5</sub>	
6.		Ibu Anna Susanti	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang	I <sub>1-6</sub>	
7.		Bapak Abdul Khoir	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang	I <sub>1-7</sub>	
8.		Ibu Nanik Kusumawati, S.IP	Staff Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pinang, Kota Tangerang	I <sub>1-8</sub>	
9.		Bapak Suryadi Ali	Staff Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang	I <sub>1-9</sub>	
10.		Ibu Fiatikara	Staff Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang	I <sub>1-10</sub>	
11.		Bapak Yoyo, S.IP	Sekretaris Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang	I <sub>1-11</sub>	
12.		Bapak Nasan Musa	Sekretaris Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah	I <sub>1-12</sub>	
13.		M A S Y	Ibu Dewi Anggraeni	Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang	I <sub>2-1</sub>
14.			Bapak Sianta Maulana	Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur	I <sub>2-2</sub>



15.	A R	Ibu Rukisah	Ketua Kelompok Tani Kelurahan Parung Jaya	I <sub>2-3</sub>
16.	A K A T	Bapak Martani	Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya	I <sub>2-4</sub>

(Sumber: Peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa deskripsi dari masing-masing informan dalam penelitian mengenai “*Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah*”. Informan di atas merupakan informan yang peneliti anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan penelitian yang peneliti analisis. Hal ini ditujukan untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dan kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

#### 4.2.2 Hasil Penelitian Lapangan

Setelah menentukan daftar informan penelitian, langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan penelitian (*data collection*) baik melalui wawancara terhadap informan maupun observasi lapangan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena yang kompleks yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan banyaknya informasi yang didapat di lapangan, maka peneliti melakukan proses reduksi data (*data reduction*) atau memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, peneliti mengkategorikan jawaban-jawaban yang dianggap sama yang berkaitan dengan pembahasan dan dimuat dalam tabel matriks hasil wawancara. Kategorisasi

dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam membaca dan menganalisis jawaban-jawaban tersebut sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Untuk penyajian data (*data display*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks narasi, tabel, dan gambar. Selanjutnya penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) dilakukan setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi yang sama. Data-data tersebut dapat dilihat dari pemaparan hasil penelitian lapangan berikut ini.

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan tersebut terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan juga menjadi penting. Implementor bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Berkaitan dengan fokus penelitian ini, salah satu tujuan dari Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah adalah mengembangkan potensi pertanian perkotaan. Sebagaimana diutarakan oleh  $I_{1-1}$  sebagai berikut:

*“Tujuan dari Tangerang Berkebun memang untuk mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming), tapi tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan keterbatasan lahan yang ada, kami berusaha memanfaatkan lahan yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk ditanami toga (tanaman obat keluarga) atau sayuran yang mudah ditanam di lahan terbatas.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa Program Tangerang Berkebun dijalankan untuk mengembangkan pertanian perkotaan (*urban farming*) dengan tujuan salah satunya adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi gizi keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk dijadikan lahan pembudidayaan tanaman obat keluarga (toga) atau sayuran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh I<sub>2-1</sub>:

*“Kalau mengacu pada informasi yang diberitahukan pihak dinas, tujuan adanya kegiatan ini untuk memenuhi gizi keluarga, caranya dengan melakukan budidaya tanaman di lahan terbatas seperti pekarangan rumah. Tanaman yang biasanya di budidaya itu tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut toga, seperti jahe dan yang lainnya. Ada juga budidaya sayur-sayuran seperti tomat, cabai dan lain-lain.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Senada dengan I<sub>2-1</sub>, I<sub>2-3</sub> pun mengungkapkan hal serupa. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-3</sub>:

*“Iya, tujuannya memang untuk memenuhi gizi keluarga. Kalau menanam sendiri kan jadi tersedia pangan yang lebih sehat. Tujuan lainnya ya memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Karena sudah jarang lahan besar yang bisa digunakan untuk kegiatan budidaya, jadi digunakan lahan yang ada saja seperti di perkarangan rumah atau di belakang rumah yang belum dipakai.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tujuan Program Tangerang Berkebun berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga di wilayah Kota Tangerang yang memang merupakan sasaran dari program tersebut. Hal ini seperti disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>:

*“Sasaran dari program ini sudah pasti ibu rumah tangga di wilayah Kota Tangerang. Kita mengambil sasaran ibu-ibu karena memang salah satu tujuan program ini kan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dan program ini memang bukan program yang berat sekali seperti bertani di sawah, karena hanya memanfaatkan lahan pekarangan atau halaman belakang rumah yang kosong belum terpakai. Tanaman yang di budidaya pun yang ringan-ringan saja, yang perawatannya mudah sehingga tidak menyulitkan ibu-ibu. Justru memberikan kegiatan lain yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang mereka.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

I<sub>1-1</sub> menambahkan, Program Tangerang Berkebun sudah tepat sasaran mengingat program ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Bahkan tahun ini sudah memasuki tahun ke-5 program ini berjalan. Pendapat yang sama disampaikan oleh I<sub>1-8</sub>, yang mengatakan bahwa:

*“Benar. Yang saya tahu, Tangerang Berkebun memang sasarannya ibu-ibu rumah tangga. Dan melihat kegiatan ini berjalan, sepertinya kegiatan ini sudah tepat sasaran.”* (Wawancara, Rabu, 30 Mei 2018. Pukul 10:50 WIB. Di Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Sependapat dengan I<sub>1-8</sub>, I<sub>1-12</sub> membenarkan bahwa sasaran dari Program Tangerang Berkebun adalah ibu rumah tangga. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-12</sub>:

*“Iya memang benar sasarannya ibu-ibu, ibu rumah tangga. Diutamakan yang punya minat berkebun. Kalau disini karena kegiatan ini sudah berjalan di tahun ke-2, menurut saya sudah tepat sasaran.”* (Wawancara,

Senin, 28 Mei 2018. Pukul 11:14 WIB. Di Kantor Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah).

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa Program Tangerang Berkebun sudah tepat sasaran. Dalam Program Tangerang Berkebun yang menjadi sasaran utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga yang kemudian tergabung dalam Kelompok Wanita Tani.

Selanjutnya, I<sub>1-1</sub> menjelaskan mengenai standar keberhasilan Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Standar keberhasilan dari Program Tangerang Berkebun adalah berkelanjutan. Berlanjut atau tidaknya itu menentukan berhasil atau tidaknya program ini. Jika dilihat saat ini, Program Tangerang Berkebun sudah memasuki tahun ke-5. Dapat dikatakan program ini sudah berhasil dilaksanakan selama 4 tahun, maka dari itu dilanjutkan kembali pada tahun ini.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Pendapat serupa diutarakan oleh I<sub>2-1</sub>, beliau mengatakan jika yang menentukan berhasil atau tidaknya Program Tangerang Berkebun adalah berlanjut atau tidak program tersebut dijalankan di wilayah yang telah di bina oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-1</sub>:

*“Seperti yang disampaikan oleh pihak dinas sewaktu pembekalan, keberhasilan program ini dilihat dari berjalan atau tidaknya kegiatan budidaya ini. Kalau disini sih berjalan, jadi bisa dikatakan berhasil. Kalau standar keberhasilan dari kita sendiri sih tidak ada sih”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

I<sub>2-3</sub> menambahkan jika program ini memberikan hasil selama masa pembinaan dan terus berlanjut setelah masa pembinaan berakhir maka program ini dapat dikatakan berjalan atau sudah berhasil. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-3</sub>:

*“Standar keberhasilannya melihat kegiatan ini berjalan atau tidak. Kalau berlanjut setelah masa pembinaan selesai dan ada hasil yang bisa dinikmati oleh kita, bisa dikatakan kegiatan ini sudah berhasil.”*  
(Wawancara, Senin, 28 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani RW.03 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa standar keberhasilan yang ditetapkan pada Program Tangerang Berkebun dapat dikatakan cukup sederhana, yaitu keberlanjutan dari program itu sendiri. Hal ini dikarenakan lokasi dari Program Tangerang Berkebun berbeda-beda setiap tahunnya. Lokasi yang berhasil menjalankan Program Tangerang Berkebun setelah satu tahun menjalani masa pembinaan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang akan dijadikan lokasi percontohan untuk lokasi lain. Pengurus di lokasi tersebut kemudian akan diperbantukan sebagai pembimbing untuk membantu membimbing di lokasi lain yang sedang dalam masa pembinaan.

## **2. Sumber Daya.**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan.

Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial serta sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van Metter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

*Pertama*, sumberdaya manusia. Dalam hal ini yang menjadi pelaksana dari Program Tangerang Berkebun yang sumberdaya manusianya sudah ditetapkan dan terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan masyarakat, yang dalam hal ini adalah ibu rumah tangga. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>:

*“Kalau yang dimaksud dengan sumberdaya manusia itu pelaksana dari Program Tangerang Berkebun, berarti itu pihak dari kita (Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang) dan masyarakat yang dalam hal ini adalah ibu rumah tangga. Ada juga bantuan dari kementerian yang*

*bertugas sebagai pembimbing.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Sesuai dengan I<sub>1-1</sub>, I<sub>1-8</sub> menyatakan pelaksanaan Program Tangerang Berkebun sepenuhnya diserahkan kepada ibu-ibu yang menjadi sasaran program dan sumberdaya manusia dalam kegiatan ini. Berikut pernyataan dari I<sub>1-8</sub>:

*“Untuk Tangerang Berkebun ya sumberdaya manusia yang jadi pelaksananya kalau dari pihak kecamatan sendiri tidak ada. Langsung diserahkan ke kelurahan dan masyarakat. Kan nanti yang menentukan siapa yang akan ikut berpartisipasi itu ibu-ibu PKK.”* (Wawancara, Rabu, 30 Mei 2018. Pukul 10:50 WIB. Di Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Berbeda dengan pernyataan yang diutarakan oleh I<sub>1-8</sub>, I<sub>1-10</sub> mengatakan bahwa pihak kelurahan pun bukan merupakan pelaksana langsung dari Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Tangerang Berkebun itu pelaksananya masyarakat langsung, ibu-ibu PKK dan ibu rumah tangga. Kami hanya terlibat dalam proses legalisasi saja. Tidak terlibat langsung.”* (Wawancara, Jumat, 25 Mei 2018. Pukul 14:07 WIB. Di Kantor Kelurahan Panunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa meskipun pihak kecamatan dan kelurahan merupakan sumberdaya manusia dalam Program Tangerang Berkebun, namun keduanya bukanlah pelaksana langsung dari program tersebut. Hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran dari program ini adalah masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga.



Kemudian I<sub>1-1</sub> menambahkan, jumlah sumberdaya manusia dalam Program Tangerang Berkebun menyesuaikan dengan kebutuhan dan berbeda-beda di setiap lokasi. Berikut pernyataan I<sub>1-1</sub>:

*“Kalau untuk jumlahnya sendiri, biasanya mengikuti saja. Menyesuaikan kebutuhan program selama satu tahun dan di lapangan seperti apa. Sumberdaya manusianya tidak berubah, dari pegawai yang ada saja di Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Untuk yang mengikuti Program Tangerang Berkebun itu kan ibu-ibu PKK biasanya sekitar 5-10 orang dalam satu kelompok. Di tiap lokasi berbeda-beda jumlahnya. Tergantung SK yang dikeluarkan pihak kelurahan.”* (Wawancara, Kamis 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

I<sub>1-12</sub> membenarkan pernyataan I<sub>1-1</sub> berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Kalau sumberdaya manusia yang pelaksananya itu dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan langsung ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT). Kalau dari kita tidak ada, paling hanya bantu pengawasan saja jika dibutuhkan dan untuk data di laporan. Dari ibu-ibu PKK biasanya ya sekitar 5-10 orang, tergantung minat dari ibu-ibunya saja. Tidak ada ketentuan harus berapa banyak.”* (Wawancara, Senin, 28 Mei 2018. Pukul 11:14 WIB. Di Kantor Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah).

Hal serupa diungkapkan oleh I<sub>2-1</sub>, yang mengatakan bahwa jumlah pelaksana Program Tangerang Berkebun di tingkat masyarakat bergantung dari minat masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Berikut pernyataan dari I<sub>2-1</sub>:

*“Jumlah sumberdaya manusia yang jadi pelaksana program ini kalau dari kita tidak menentu, tergantung dari minat ibu-ibu saja. Siapa yang*

*berminat boleh mengajukan. Tapi biasanya memang tidak banyak. Kurang lebih 5 orang.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Senada dengan I<sub>2-1</sub>, I<sub>2-3</sub> pun mengungkapkan jika jumlah sumberdaya manusia sebagai pelaksana Program Tangerang Berkebun tidak banyak.

Penyataannya sebagai berikut:

*“Benar, jumlahnya tidak banyak. Paling sekitar 5-10 orang di satu kelurahan. Kita yang tanya ke ibu-ibu, mereka mau ikut program itu atau tidak. Tapi ada juga yang mengajukan karena berminat untuk ikut.”* (Wawancara, Senin, 28 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani RW.03 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam penentuan jumlah sumberdaya manusia sebagai pelaksana Program Tangerang Berkebun. Jumlah sumberdaya manusia yang menjadi pelaksanaanya menyesuaikan dengan nama-nama yang diajukan di tiap titik lokasi dari Program Tangerang Berkebun. Jumlahnya pun tidak banyak, kurang lebih sekitar 5-10 orang saja pada beberapa titik lokasi yang ada dalam 1 kelurahan kemudian akan menjadi kelompok, yang tidak jarang disebut sebagai Kelompok Wanita Tani (KWT).

*Kedua*, sumberdaya finansial. Anggaran merupakan salah satu penopang utama dalam proses implementasi kebijakan. Keberlangsungan suatu kebijakan pun bergantung pada anggaran yang ditetapkan. Sebab dengan adanya anggaran, pelaksana dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk implementasi

kebijakan publik. Hal tersebut diungkapkan oleh I<sub>1-4</sub>, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Anggaran itu krusial sekali. Bagaimana kebijakan, program atau kegiatan apapun bisa berjalan kalau tidak ada anggaran yang disediakan? Buat hal kecil saja kita kadang harus bayar agar tetap berjalan, apalagi kebijakan atau program pemerintah yang melibatkan banyak pihak dan banyak kebutuhan untuk menunjang keberlangsungan kebijakan atau program tersebut.”* (Wawancara, Selasa, 22 Mei 2018. Pukul 11:30 WIB. Di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang).

Pendapat yang sama disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>, beliau mengatakan bahwa sumberdaya finansial memang sangatlah penting. Terutama untuk tiap kebijakan atau program yang telah ditetapkan, harus dibuatkan dan dirincikan anggarannya sejelas mungkin. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>:

*“Jelas anggaran sangatlah penting untuk keberlangsungan kebijakan atau program yang akan dan sedang dijalankan. Dan harus dirinci anggarannya dari mana, untuk kebutuhan apa saja, dan yang lainnya. Kebijakan atau program tidak akan bisa jalan kalau anggarannya tidak ada.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan pentingnya anggaran bagi keberlangsungan suatu kebijakan atau program. Program Tangerang Berkebun yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun telah memiliki sumberdaya finansial yang cukup baik. Hal ini seperti disampaikan oleh I<sub>1-1</sub> sebagai berikut:

*“Sejauh ini, anggaran cukup baik untuk Program Tangerang Berkebun. Anggarannya diambil dari APBD. Kemudian dibuatkan rinciannya. Setiap tahun jumlah anggaran yang dianggarkan untuk program ini berbeda-beda jumlahnya, menyesuaikan dengan kebutuhan selama 1 tahun*

*program akan dijalankan.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan pada Program Tangerang Berkebun ternyata tidak sama setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan anggaran yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang untuk Program Tangerang Berkebun selama periode 1 tahun. Selanjutnya, I<sub>2-1</sub> menjelaskan mengenai sumberdaya finansial atau anggaran yang didapatkan untuk menjalankan Program Tangerang Berkebun di tingkat masyarakat. Berikut pernyataannya:

*“Sumberdaya finansial dalam bentuk dana langsung sih tidak ada, kami biasanya langsung dapat bantuan berupa bibit tanaman dan pupuk. Untuk perawatannya ya kami menggunakan dana sendiri hasil dari iuran ibu-ibu yang ikut kegiatan ini. Iurannya tidak besar kisaran 10 ribuan tapi tergantung kesepakatan bersama.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Hal serupa pun disampaikan oleh I<sub>2-3</sub> yang membenarkan jika sumberdaya finansial yang didapatkan dari pihak dinas bukan berupa dana langsung, melainkan berupa sarana seperti bibit tanaman dan pupuk. Sedangkan untuk dana perawatan tanaman, didapatkan dari iuran yang dilakukan oleh masyarakat atau ibu-ibu rumah tangga yang ikut serta dalam Program Tangerang Berkebun. Tidak jarang, mereka pun menggunakan dana pribadi sebagai alternatif lain. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-3</sub>:

*“Pendanaan langsung dari pihak dinas memang tidak ada, biasanya mereka membantu dalam bentuk bibit dan pupuk. Pendanaan langsung ya dari kita, kita mengadakan iuran untuk kebutuhan perawatan tanaman. Iurannya biasanya ya 5 - 10 ribuan.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Pernyataan berbeda disampaikan oleh I<sub>2-4</sub>, salah seorang petani di wilayah Kecamatan Karang Tengah yang tergabung dalam Kelompok Usaha Tani dan merupakan ketua dari Kelompok Usaha Tani di wilayah Kecamatan Karang Tengah. Beliau mengatakan jika tidak pernah ada bantuan berupa dana langsung dari pihak terkait dalam hal pengembangan usaha pertanian yang telah berjalan sejak 1980-an. Berikut pernyataannya:

*“Tidak ada. Pendanaan berupa uang tidak pernah, paling hanya bantuan bibit dan pupuk. Itupun tidak rutin. Tapi ya kami terima saja bantuan dalam bentuk apapun. Untuk perawatan sehari-hari kita pakai dana pribadi. Besarannya ya tergantung, berbeda-beda tiap tanaman. Biasanya sih kisaran 3-4 juta untuk perawatannya.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. Pukul 11:43 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

I<sub>2-2</sub> mengungkapkan hal yang serupa dengan I<sub>2-4</sub> terkait anggaran untuk pengembangan usaha pertanian yang dijalani. Berikut pernyataannya:

*“Kalau bantuan dana langsung dari dinas belum ada. Kalau untuk anggaran yang kita pakai, karena ini usaha sendiri ya pakai dana pribadi. Jumlah anggarannya menyesuaikan saja apa sedang kita budidaya. Tidak menentu, tapi biasanya sekitar 2 jutaan.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 11:17 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Kota Tangerang sumberdaya finansial atau anggaran

yang digunakan dalam menjalankan Program Tangerang Berkebun bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang setiap tahunnya jumlahnya berbeda-beda karena menyesuaikan pengajuan anggaran yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan keperluan yang dibutuhkan selama periode 1 tahun program dijalankan. Namun untuk perawatan tanaman, ibu-ibu mengadakan iuran yang besarnya kurang lebih 5-10 ribu rupiah karena bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang tidak berupa dana langsung. Hal yang sama dialami oleh Kelompok Usaha Tani yang juga tidak menerima bantuan dana. Bahkan terkadang menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan usahanya.

*Ketiga*, sumberdaya waktu. Kesesuaian waktu dalam proses implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Program Tangerang Berkebun telah berjalan sejak 2014, namun wilayah awal yang menjadi sasaran program bukan di wilayah Kecamatan Pinang maupun Kecamatan Karang Tengah. Sebagaimana disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>:

*“Program ini mulai berjalan tahun 2014. Untuk wilayah awal yang menjadi sasarannya itu ada Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cipondoh, dan Kecamatan Batucapeper. Kalau di wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah baru mulai dijalankan pada tahun 2015.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Hal serupa dikemukakan oleh I<sub>1-8</sub>, yang membenarkan jika kegiatan Tangerang Berkebun baru berjalan di wilayah Kecamatan Pinang pada tahun 2015. Berikut pernyataannya:

*“Saya tidak tahu pastinya Tangerang Berkebun itu dimulai tahun berapa. Tapi memang benar, kalau di wilayah Kecamatan Pinang baru berjalan tahun 2015. Mulanya di wilayah Kelurahan Kunciran Jaya, Kelurahan Pinang, Kelurahan Panunggangan Timur, dan Kelurahan Panunggangan Utara. Yang masih berjalan hingga saat ini dan berkembang dengan baik ada di wilayah Kelurahan Pinang.”* (Wawancara, Rabu, 30 Mei 2018. Pukul 10:50 WIB. Di Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh I<sub>1-9</sub> terkait implementasi Program Tangerang Berkebun di wilayah Kecamatan Karang Tengah. Berikut pernyataan yang dinyatakan oleh I<sub>1-9</sub>:

*“Iya benar, di wilayah Kecamatan Karang Tengah ini baru berjalan tahun 2015. Awalnya ada di wilayah Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Karang Timur, Kelurahan Karang Tengah, dan Kelurahan Parung Jaya. Tapi saat ini yang berjalan baik ada di wilayah Parung Jaya.”* (Wawancara, Senin, 28 Mei 2018. Pukul 13:49 WIB. Di Kantor Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Pinang Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Program Tangerang Berkebun tidak langsung berjalan di wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia saat awal menjalankan Program Tangerang Berkebun. Karena standar keberhasilan dari Program Tangerang Berkebun adalah keberlanjutan, maka pada awal dimulainya program tersebut difokuskan hanya pada beberapa titik lokasi saja, yaitu di wilayah Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cipondoh, dan Kecamatan Batuceper.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana.**

Pusat perhatian pada agen pelaksana dalam implementasi Program Tangerang Berkebun adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan Kelompok Wanita Tani yang kemudian terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu mengubah perilaku dasar manusia, maka bisa saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan setegas pada contoh sebelumnya.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar/banyak pula agen pelaksana yang dilibatkan. Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana itu sendiri dan standar operasional pelaksanaan kebijakan.

*Pertama*, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Program Tangerang Berkebun, yang dalam hal ini melibatkan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang serta ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani sebagai pelaksana program. Berikut pernyataan mengenai



keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dalam proses implementasi

Program Tangerang Berkebun yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>:

*“Untuk Program Tangerang Berkebun, peran kita adalah sebagai pelaksana bersama dengan ibu-ibu rumah tangga. Dibantu dengan pihak-pihak terkait tergantung dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan seperti apa. Contohnya kalau di salah satu titik lokasi program kita dibarengi dengan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), nanti kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang terkait pelaksanaan programnya ingin bagaimana. Begitupun dengan yang lainnya.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Hal tersebut dibenarkan oleh I<sub>1-8</sub>, beliau pun menambahkan jika pelaksanaan Program Tangerang Berkebun tidak melibatkan pihak kecamatan secara langsung sebagai pelaksana program. Hanya membantu secara teknik, tidak secara keseluruhan. Berikut pernyataan yang diutarakan oleh I<sub>1-8</sub>:

*“Iya benar, kita disini hanya bantu teknis saja. Biasanya kita bantu untuk kegiatan sosialisasi Program Tangerang Berkebun ke masyarakat. Karena kalau dilakukan di masing-masing kelurahan akan memakan waktu lebih banyak. Selebihnya bantu mengawasi saja.”* (Wawancara, Rabu, 30 Mei 2018. Pukul 10:50 WIB. Di Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

I<sub>1-10</sub> pun mengutarakan pendapat yang sama terkait peran kelurahan pada proses implementasi Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Tidak terlibat langsung, kita disini kalau perannya ya lebih ke pengawas mungkin ya. Karena kan kita lebih ke legalisator saja. Nanti siapa yang diajukan oleh ketua PKK nama-namanya, kita buat suratnya untuk disampaikan ke dinas terkait.”* (Wawancara, Jumat, 25 Mei 2018. Pukul 14:07 WIB. Di Kantor Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun, pihak kecamatan maupun kelurahan yang menjadi titik lokasi Program Tangerang Berkebun tidak terlibat secara langsung sebagai pelaksana program. Mereka hanya terlibat sebagai pengawas di lapangan dan kebutuhan teknis seperti sosialisasi.

Selanjutnya mengenai keterlibatan ibu-ibu rumah tangga di wilayah Kota Tangerang dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataan dari I<sub>2-1</sub>:

*“Untuk peran kita pada Program Tangerang Berkebun ini jelas ya sebagai pelaksana langsung dari program tersebut. Karena kan kita yang melakukan budidaya tanaman atau sayurannya.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Hal senada diungkapkan oleh I<sub>2-3</sub> terkait peran ibu-ibu rumah tangga pada pelaksanaan Program Tangerang Berkebun. Pernyataannya sebagai berikut:

*“Kita ini kan yang menjalankan kegiatan budidaya tanaman dan sayuran secara langsung, berarti sudah jelas peran kita sebagai pelaksana program.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peran ibu-ibu rumah tangga dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun sangatlah besar sebab ibu-ibu rumah tanggalah yang akan langsung melakukan kegiatan budidaya tanaman maupun sayuran. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang juga berperan sebagai pelaksana namun tidak melakukan kegiatan

budidaya secara langsung. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang hanya mengurus kebutuhan teknis seperti ingin mengadakan sosialisasi yang kemudian dibantu oleh pihak kecamatan sebagai penyedia fasilitas sosialisasi dan pihak kelurahan yang menjadi legalisator dalam mengesahkan siapa-siapa saja yang terlibat menjadi pelaksana langsung program tersebut.

*Kedua*, standar operasional pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Standar operasional merupakan acuan dalam melaksanakan kebijakan publik agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini pernyataan yang dikemukakan oleh I<sub>1-1</sub> berkaitan dengan standar operasional pada Program Tangerang Berkebun. Berikut ini pernyataannya:

*“Standar pelaksanaan untuk Tangerang Berkebun itu ada dua. Pertama, sosialisasi berupa pembekalan kepada peserta kegiatan Tangerang Berkebun. Biasanya diadakan per kecamatan agar lebih efisien. Kedua, temu teknis. Itu maksudnya kita langsung praktik ke lapangan. Biasanya di lakukan 1 kali, setelah itu diserahkan kepada pembimbing yang sudah ditugaskan dan masyarakat untuk melakukan budidaya atau perawatan tanaman yang sudah ditanam sebelumnya.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

**Gambar 4.2**  
**Kegiatan Penanaman Bibit Melon Pada Program Tangerang Berkebun**



(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang)

Pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub> kemudian dibenarkan dengan pernyataan yang diutarakan oleh I<sub>2-1</sub> sebagai berikut:

*“Kalau standar pelaksanaan dari dinas biasanya ada sosialisasi dulu. Setelah itu nanti langsung turun ke lapangan, praktik langsung untuk olah tanah dan tanam bibit. Nanti bulan berikutnya akan di cek oleh pembimbing hasilnya bagaimana, gagal atau tidak. Kalau untuk perawatannya selama sebelum panen ya menyesuaikan dengan tanamannya saja.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

I<sub>2-3</sub> pun mengungkapkan hal serupa terkait standar pelaksanaan Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataan I<sub>2-3</sub>:

*“Standar pelaksanaan yang dari dinas saya kurang tahu pasti, tapi yang saya ikut itu ada pembekalan cara budidaya tanamannya seperti apa. Diajari juga cara mengolah tanah. Kalau yang saya lakukan sih standar saja mengikuti yang disarankan dari dinas. Karena tiap tanaman berbeda waktunya sampai panen. Tidak ada standar pelaksanaan khusus.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pada tingkat masyarakat tidak diatur standar operasional pelaksanaan Program Tangerang Berkebun secara khusus. Dalam melaksanakan kegiatan budidaya tanaman dan sayuran, ibu-ibu hanya mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan mengatur jadwal kegiatan budidaya dengan menyesuaikan jangka waktu perawatan hingga panen per tanaman atau sayuran.

**Gambar 4.3**  
**Panen Kangkung Hasil Program Tangerang Berkebun**



*(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang)*

#### **4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi).**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat memungkinkan terjadi dikarenakan kebijakan yang dil

aksanakan bukanlah hasil formulasi Pegawai Negeri Sipil yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor kebijakan laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top-down) yang sangat memungkinkan para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang pegawai ingin selesaikan.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap

kinerja implementasi kebijakan, yaitu kognisi (pemahaman) para agen pelaksana serta respon (penerimaan/penolakan) para agen pelaksana.

*Pertama*, kognisi (pemahaman) para agen pelaksana terkait implementasi Program Tangerang terhadap implementasi program tersebut. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>:

*“Pelaksana kegiatan Tangerang Berkebun ini kan sebelum diberikan tugas ke lapangan pasti ada sosialisasi dan arahan dulu untuk memahami kegiatan ini maksud dan tujuannya seperti apa, baik untuk pihak dinas maupun masyarakat. Kalau untuk pembimbing itu nanti disesuaikan dengan kompetensi mereka juga. Kira-kira sesuai tidak atau minimal berpengalaman atau tidak di bidang itu. Dilihat seperti apa pengalaman di lapangan dan kegiatan yang sudah dijalani sebelumnya. Kalau melihat program ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, saya kira pelaksana program ini sudah paham ya bagaimana menjalankan program ini.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Sebagai pelaksana langsung dari Program Tangerang Berkebun ini, I<sub>2-1</sub> memberikan pendapatnya mengenai pemahamannya terhadap Program Tangerang Berkebun yang sudah dijalaninya. Berikut pernyataannya:

*“Berbicara pemahaman terkait Program Tangerang Berkebun, sebetulnya pada awalnya saya sendiri agak sulit memahaminya karena ini adalah hal baru buat saya. Apalagi saya sendiri ibu rumah tangga yang jarang sekali bisa mempelajari satu hal secara mendalam karena saya harus mengurus rumah, anak, suami, dan lain-lain. Tapi seiring waktu alhamdulillah lama kelamaan saya paham karena sebelum Program Tangerang Berkebun ini benar-benar berjalan pun ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Pendapat yang sama diutarakan oleh I<sub>2-3</sub>. Beliau membenarkan jika sebelum Program Tangerang Berkebun ini benar-benar berjalan di masyarakat, ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku penanggung jawab program tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-3</sub>:

*“Jika ditanya bagaimana pemahaman saya sebagai ibu rumah tangga terhadap Program Tangerang Berkebun, alhamdulillah saya sudah paham. Tapi tidak serta merta saya memahaminya. Sebelumnya, saya diberikan pembekalan dan arahan terkait program ini oleh orang dinas. Acaranya dilaksanakan di kantor kecamatan dalam bentuk sosialisasi. Setelah itu kita praktik langsung ke lapangan di dampingi oleh pembimbing. Belajar bagaimana cara mengolah tanah, menanam bibit, cara memindahkan tanaman dari pot satu ke pot lainnya, cara memberi pupuk yang baik, pengairan, perawatan tanaman atau sayurannya seperti apa, sampai cara memanen.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana Program Tangerang Berkebun telah memahami maksud dan tujuan dari program tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan program ini tetap berjalan dan dapat memasuki tahun ke-5.

*Kedua*, respon para agen pelaksana mengenai implementasi Program Tangerang Berkebun. Sebagai pelaksana langsung dari Program Tangerang Berkebun, I<sub>1-1</sub> mengutarakan pendapatnya yang sangat menyetujui diadakannya program tersebut. Berikut pernyataannya:

*“Saya secara pribadi sangat menyetujui adanya program ini. Selain membantu masyarakat, program ini membantu kita mengembangkan konsep pertanian perkotaan. Sisi lainnya, lingkungan jadi lebih asri karena banyak tanaman yang ditanam masyarakat.”* (Wawancara, Kamis,

24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa Program Tangerang Berkebun akan sangat baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar apabila dijalankan. Sependapat dengan I<sub>1-1</sub>, I<sub>1-4</sub> mengatakan bahwa program tersebut sangat bagus dan akan menjadi lebih besar jika dipromosikan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-4</sub>:

*“Tangerang Berkebun itu bagus sekali. Kalau kita bisa bantu dilibatkan dalam hal promosi mungkin akan lebih besar lagi dari sekarang. Setuju sekali saya dengan kegiatan ini. Bagus untuk masyarakat.”* (Wawancara, Selasa, 22 Mei 2018. Pukul 11:30 WIB. Di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang).

Senada dengan I<sub>1-4</sub>, I<sub>1-2</sub> mengatakan jika beliau menyetujui apabila Program Tangerang Berkebun adalah dijalankan. Berikut pernyataannya:

*“Saya setuju saja program tersebut dijalankan karena sebetulnya program itu untuk kepentingan masyarakat. Baik untuk masyarakat. Bisa membantu perekonomian masyarakat juga mungkin. Hasilnya kan nanti bisa dijual atau dinikmati sendiri.”* (Wawancara, Senin, 7 Mei 2018. Pukul 15:06 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Hal diatas seperti yang diungkapkan oleh I<sub>2-4</sub>. Sebagai seorang petani, beliau mengungkapkan pernyataannya sebagai berikut:

*“Saya setuju saja kalau Tangerang Berkebun dijalankan. Meskipun tidak berpengaruh langsung dengan para petani karena fokusnya lebih mengarah ke ibu-ibu rumah tangga. Paling tidak para ibu-ibu rumah tangga itu punya kesibukan yang lebih positif diluar rumah.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. Pukul 11:43 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).



Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa implementasi Program Tangerang Berkebun memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat. Sehingga apabila dijalankan, pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak akan sangat setuju dengan program tersebut.

##### **5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.**

Merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Begitu pula sebaliknya. Dari dimensi ini peneliti membaginya ke dalam dua aspek penilaian, yaitu koordinasi dan sosialisasi.

*Pertama*, koordinasi para agen pelaksana. I<sub>1-1</sub> menjelaskan koordinasi pada Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Kalau koordinasi, kita langsung dengan pihak kelurahan. Karena kelurahan kan yang buat SK untuk siapa-siapa saja yang ikut kegiatan Tangerang Berkebun. Nanti setelah itu kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pembimbing dan masyarakat untuk di lapangannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan koordinasi dengan dinas lain, itu menyesuaikan dengan keadaan di RW yang diajukan sebagai lokasi kegiatan Tangerang Berkebun. Kalau lokasinya ternyata berbarengan dengan lokasi program atau kegiatan lain dari dinas lain, ya kita koordinasi dengan pihak dinas tersebut untuk bagaimana menjalankan kegiatan itu bersama.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

Senada dengan I<sub>1-1</sub>, I<sub>2-1</sub> mengungkapkan jika sebagai pelaksana langsung dari Program Tangerang Berkebun beliau melakukan koordinasi langsung dengan

pembimbing yang ditugaskan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada program tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-1</sub>:

*“Untuk koordinasinya ya, kita biasanya langsung dengan pembimbing yang disediakan dinas. Kalau untuk awalnya biasanya kita setelah dikasih info dari kelurahan kalau di RW kita akan ada kegiatan Tangerang Berkebun, kita diminta mengajukan nama-nama siapa yang sekiranya berminat untuk ikut. Nanti suratnya keluar, kita dikabarkan lagi akan ada sosialisasi. Semacam pembekalan begitu. Setelah itu sudah, komunikasi dan koordinasinya dengan pembimbing sama ibu-ibu yang ikut saja. Kan semuanya diserahkan ke kita. Kita yang urus jadi kita yang tanggung jawab.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana Program Tangerang Berkebun sudah baik karena pelaksanaan Program Tangerang Berkebun memang memiliki kesiapan yang cukup matang.

*Kedua*, sosialisasi yang dilakukan agen pelaksana. I<sub>1-1</sub> menjelaskan mengenai sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Sosialisasi itu kan lebih ke pembekalan kepada peserta Tangerang Berkebun. Kita sediakan pembicara yang paham mengenai tanaman yang akan di budidaya. Sosialisasi biasanya diadakan di kantor kecamatan, nanti pembicaranya menyesuaikan dengan tanaman apa saja yang kira-kira akan di budidaya di wilayah kecamatan itu.”* (Wawancara, Kamis, 24 Mei 2018. Pukul 11:34 WIB. Di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang).

**Gambar 4.4**  
**Sosialisasi Program Tangerang Berkebun serta pemberian bibit cabai kepada masyarakat**



(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang)

I<sub>2-1</sub> yang merupakan pelaksana pada Program Tangerang Berkebun pun mengungkapkan pendapatnya terkait sosialisasi Program Tangerang Berkebun.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-1</sub>:

*“Sudah pasti ada ya sosialisasi. Sosialisasinya itu kita diajarkan cara budidaya tanaman yang akan di budidaya secara keseluruhan dari pembibitan, perawatan sampai panen. Cara pengolahan lahan pun diajarkan.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Pendapat yang sama disampaikan oleh I<sub>2-3</sub> sebagai berikut:

*“Sosialisasi yang pembekalan itu memang ada. Kan kita ibu rumah tangga ya, tidak semuanya paham cara berkebun itu bagaimana. Karena itu mungkin diadakan pembekalan. Diajarkan semuanya. Caranya mengolah tanah agar bisa digunakan untuk tanam bibit, campuran pupuknya bagaimana, cara tanam bibitnya, kapan harus dipindahkan ke wadah yang lebih besar, perawatannya seperti apa, cara panennya bagaimana juga diajarkan.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman

Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pada Program Tangerang Berkebun sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga Program Tangerang Berkebun dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksananya.

## **6. Lingkungan Eksternal.**

Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan publik harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat selama proses implementasi Program Tangerang Berkebun, berikut ini adalah kutipan-kutipan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber.

*Pertama*, kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi di suatu wilayah menjadi salah satu dampak yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sekitar selama proses implementasi kebijakan publik. Seringkali, perubahan tersebut menjadi alasan masyarakat untuk mendukung atau menolak keberlanjutan dari implementasi kebijakan publik.

Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-2</sub> terkait kondisi ekonomi beliau sebagai seorang petani:

*“Pendapatan yang saya dapat sebagai seorang petani alhamdulillah cukup untuk menghidupi anak dan istri walaupun kadang pas-pasan karena saya juga kan bertani modal sendiri, tidak dibantu sama pemerintah. Waktu itu orang dinas pernah kesini membicarakan soal pemberian bantuan dari pemerintah, tapi tidak tahu kenapa bantuannya tidak sampai ke saya.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 11:17 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Hal serupa diungkapkan oleh I<sub>2-4</sub> yang juga berprofesi sebagai seorang petani. Berikut pernyataannya:

*“Karena saya ini bertani sebetulnya turun temurun dari orang tua, alhamdulillah saya bisa cukup menafkahi keluarga. Meskipun tidak dibantu oleh pemerintah dan menggunakan sepenuhnya dana pribadi, alhamdulillah masih berjalan usaha ini sampai sekarang. Masih menjadi mata pencaharian tetap saya untuk keluarga.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. Pukul 11:43 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh I<sub>2-1</sub> terkait kondisi ekonomi beliau pasca mengikuti Program Tangerang Berkebun. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-1</sub>:

*“Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah ada hasil dari kegiatan ini. Selain mengurangi biaya belanja di pasar, bisa bantu keuangan keluarga juga. Karena hasil dari ini bisa dijual. Biasanya satu kilo kita hargai 30 ribu rupiah atau menyesuaikan jumlah yang dibeli pembeli berapa banyak.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

I<sub>2-3</sub> pun mengungkapkan hal yang sama dengan I<sub>2-1</sub>, beliau mengatakan jika kondisi perekonomian keluarga cukup terbantu dengan adanya Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataan dari I<sub>2-3</sub>:

*“Dari segi ekonomi alhamdulillah sangat terbantu. Kegiatan ini jadi salah satu tambahan mata pencaharian juga buat keluarga. Karena hasilnya lumayan, bisa dipakai sendiri dan bisa dijual juga.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa kondisi ekonomi para pelaksana Program Tangerang Berkebun sedikit terbantu setelah mengikuti program tersebut. Untuk kebutuhan sayuran atau tanaman obat dalam jumlah sedikit mereka tidak harus membeli bahkan dapat menjualnya kembali karena memang hasil yang didapatkan dari kegiatan budidaya tanaman obat dan sayuran sangat baik dari segi jumlah serta kualitas.

*Kedua*, kondisi sosial. Tidak hanya kondisi ekonomi. Perubahan sosial pun seringkali terasa oleh masyarakat. Perubahan sosial akibat implementasi suatu kebijakan publik pastilah berdampak besar pada lingkungan masyarakat dimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan.

Peneliti mewawancarai narasumber untuk mengetahui seperti apa perubahan kondisi sosial lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran dalam implementasi Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-4</sub>:

*“Meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, usaha pertanian ini alhamdulillah memberi dampak baik bagi lingkungan masyarakat sekitar sini. Banyak yang akhirnya mencoba bertani juga. Biasanya saya bantu, saya ajarkan caranya bertani seperti apa sampai bisa sendiri.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. Pukul 11:43 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Hal serupa pun disampaikan oleh I<sub>2-1</sub> yang merupakan pelaksana langsung dari Program Tangerang Berkebun. Berikut pernyataannya:

*“Perubahannya alhamdulillah menjadi lebih baik, lingkungan tempat tinggal saya jadi asri karena ada beberapa ibu rumah tangga yang akhirnya ikut menanam tanaman juga walaupun tidak ikut jadi pelaksana Program Tangerang Berkebun.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Pendapat yang sama diutarakan oleh I<sub>2-3</sub>, yang juga merupakan pelaksana dari Program Tangerang Berkebun. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-3</sub>:

*“Memang dampaknya cukup baik kalau saya lihat, ibu-ibu disini jadi ada kegiatan lain yang lebih positif. Dapat ilmu baru dan lingkungan juga jadi lebih baik. Lebih hijau karena lahan-lahan kosong dimanfaatkan untuk budidaya tanaman dan sayuran.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. 12:27 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak dari adanya kegiatan budidaya yang dilakukan oleh petani dan ibu-ibu yang merupakan sasaran dari Program Tangerang Berkebun ini sangat baik bagi masyarakat sekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Kegiatan budidaya yang mereka lakukan memberikan dampak positif yang kemudian memengaruhi masyarakat di

lingkungannya untuk ikut serta melakukan budidaya tanaman dan sayuran atau sekedar menanam tanaman untuk menghias rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

*Ketiga*, kondisi politik. Dalam proses implementasi kebijakan publik, tidak sedikit aktor politik yang memanfaatkan waktu implementasi kebijakan publik sebagai waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu. Namun, tidak sedikit pula yang melakukan pendekatan politik diluar proses implementasi kebijakan publik.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi politik di wilayah yang menjadi sasaran dalam implementasi kebijakan publik, peneliti mewawancarai I<sub>2-2</sub>. Berikut pernyataannya:

*“Kalau bantuan dari partai politik atau orang yang sedang kampanye seperti itu tidak ada. Yang membantu dengan maksud tertentu seperti agar dipilih jadi apa itu tidak ada.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 11:17 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

Hal yang sama diutarakan oleh I<sub>2-4</sub>, beliau mengatakan jika selama ini tidak pernah ada pengaruh politik dalam kegiatan budidaya tanaman hias yang dijalannya. Berikut pernyataannya:

*“Bantuan politik alhamdulillah tidak pernah. Meskipun kegiatan budidaya tanaman yang saya jalani memang cukup dikenal banyak orang, tapi tidak pernah terpengaruh dengan politik seperti itu.”* (Wawancara, Minggu, 27 Mei 2018. Pukul 11:43 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang).



Pernyataan yang sama pun diutarakan oleh I<sub>2-1</sub> terkait pengaruh politik di lingkungan tempat tinggalnya. Berikut pernyataan yang disampaikan I<sub>2-1</sub>:

*“Tidak pernah ada kalau bantuan politik dari kader politik atau partai politik. Karena kan kita sudah dapat bantuan langsung dari dinas. Saya rasa bantuan seperti itu nantinya justru akan menyulitkan kita karena pasti ada maksud tertentu.”* (Wawancara, Sabtu, 26 Mei 2018. Pukul 09:26 WIB. Di Kediaman Ketua Kelompok Wanita Tani Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang).

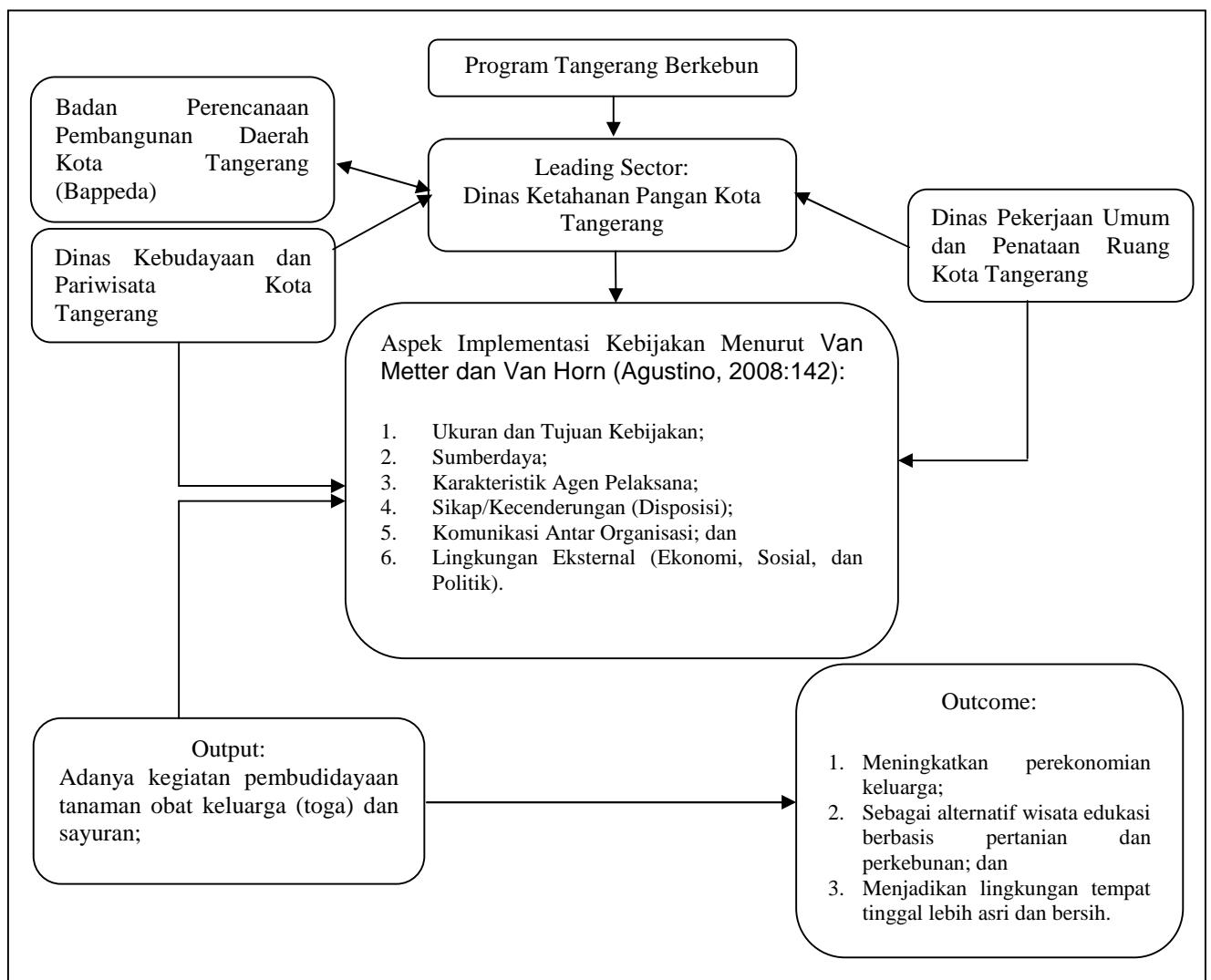
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Tangerang Berkebun tidak terpengaruh oleh politik, sehingga tidak punya tanggung jawab politik apapun kepada kelompok politik tertentu. Mereka mengatakan jika tidak pernah ada bantuan politik dalam bentuk apapun dari orang atau kelompok politik tertentu meskipun usaha pertanian mereka cukup dikenal dan tidak dibantu langsung oleh pemerintah.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) dalam Agustino (2008) mengenai *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya Ukuran Dan Tujuan

Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposisi), Komunikasi Antar Organisasi serta Lingkungan Eksternal.

**Bagan 4.2**  
**Mekanisme Implementasi Program Tangerang Berkebun Di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.**



(Sumber: Peneliti, 2018)

Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, yakni sebagai berikut:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil penelitian atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada Program Tangerang Berkebun oleh narasumber adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tujuan dari Program Tangerang Berkebun telah tercapai, yaitu mengembangkan potensi pertanian perkotaan (*urban farming*) dengan memanfaatkan lahan terbatas di sekitar lingkungan rumah yang digunakan untuk membudidayakan tanaman obat keluarga (toga) dan sayuran yang mudah dikembangkan di lahan terbatas.

*Kedua*, sasaran dari Program Tangerang Berkebun adalah ibu rumah tangga mengingat tujuan lain dari adanya program tersebut adalah untuk pemenuhan gizi keluarga, yang mana biasanya menjadi tanggung jawab ibu rumah tangga. Namun sasaran pada program ini sebenarnya adalah masyarakat Kota Tangerang secara keseluruhan. Tidak terkecuali kaum pria atau bapak-bapak. Pada data yang diterima oleh peneliti, tidak sedikit kaum pria atau bapak-bapak yang ternyata memiliki minat untuk ikut serta dalam Program Tangerang Berkebun.

*Ketiga*, standar keberhasilan untuk Program Tangerang Berkebun adalah berlanjutnya kegiatan pembudidayaan tanaman obat keluarga (toga) dan sayuran yang diatur berdasarkan Program Tangerang Berkebun. Setiap tahunnya Program Tangerang Berkebun memilih titik lokasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu,

proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan terhadap sasaran program hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun saja. Jika setelah masa pembinaan kegiatan budidaya tetap berlanjut, artinya pada titik lokasi tersebut Program Tangerang Berkebun telah berhasil dilakukan.

Adapun hasil observasi atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Observasi Atas Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

<b>Kebijakan/Program</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Hasil Observasi</b>
Program Tangerang Berkebun	Tujuan Kebijakan	Tujuan dari Program Tangerang Berkebun telah dipahami oleh para pelaksana.
	Sasaran Kebijakan	Sasaran dari Program Tangerang Berkebun sudah mengetahui dengan jelas jika mereka adalah sasaran dari program tersebut.
	Standar Keberhasilan Kebijakan	Standar keberhasilan dari Program Tangerang Berkebun telah dipahami oleh para pelaksana .

(Sumber: Peneliti, 2018)

## **2. Sumberdaya**

Sumberdaya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan, sebab manusia adalah faktor penggerak laju implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agustino (2008:142) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas serta sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maupun data yang didapati maka hasil penelitian atas dimensi Sumberdaya ialah sebagai berikut:

*Pertama*, Sumberdaya manusia pada Implementasi Program Tangerang Berkebun adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dibantu oleh masyarakat yang merupakan ibu rumah tangga dan pembimbing yang ditugaskan langsung oleh pihak kementerian untuk membantu mengembangkan potensi pertanian berbasis perkotaan.

*Kedua*, dukungan dana guna menunjang proses implementasi Program Tangerang Berkebun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Anggaran yang diperoleh kemudian dirincikan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana pada kegiatan budidaya.

*Ketiga*, sarana dan prasarana penunjang adalah salah satu hal yang utama dalam mensukseskan suatu program/kebijakan. Sarana yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang pada Program Tangerang Berkebun berasal dari dana yang diterimanya dari APBD Kota Tangerang dan diberikan dalam bentuk bibit tanaman, alat berkebun, dan/atau pupuk.

*Keempat*, mengacu pada data yang diperoleh mengenai sumberdaya waktu, Program Tangerang Berkebun telah dijalankan sejak tahun 2014. Dan telah difokuskan pelaksanaannya sejak saat itu. Namun terdapat perbedaan waktu pelaksanaan di beberapa wilayah karena dalam satu tahun periode Tangerang Berkebun hanya dijalankan di 100 titik lokasi yang berbeda pada tingkatan RT/RW. Diketahui di Kota Tangerang saat ini terdapat 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Adapun hasil observasi atas dimensi Sumberdaya pada Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Observasi Atas Dimensi Sumberdaya**

<b>Kebijakan/Program</b>	<b>Karakteristik Penilaian</b>	<b>Hasil Observasi</b>
Program Tangerang Berkebun	Dukungan Sumberdaya manusia	Sumberdaya manusia pada Program Tangerang Berkebun sudah siap dan cukup.
	Dukungan sumberdaya finansial/anggaran	Anggaran untuk Program Tangerang Berkebun telah ditetapkan dan dirasa cukup serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
	Dukungan sumberdaya sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana dari Program Tangerang Berkebun terlihat sudah cukup memadai.
	Dukungan sumberdaya waktu	Waktu pelaksanaan Program Tangerang Berkebun dirasa telah sesuai dengan apa yang ditetapkan.

(Sumber: Peneliti, 2018)

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian agen pelaksana dalam Implementasi Program Tangerang Berkebun adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan masyarakat, yang dalam hal ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana itu sendiri dan standar operasional kebijakan.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara, maka hasil penilaian atas dimensi Karakteristik Agen Pelaksana adalah sebagai berikut:

*Pertama*, dalam Implementasi Program Tangerang Berkebun, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang sebagai pelaksana telah menjalankan perannya dengan baik karena tujuan dari program tersebut telah tercapai. Bahkan standar keberhasilan yang ditetapkan pada program tersebut, yaitu keberlangsungan juga telah tercapai. Pasalnya, program ini telah memasuki tahun yang ke 5. Dan di beberapa wilayah masih berjalan meski masa pembinaan 1 tahun telah usai dilaksanakan.

*Kedua*, standar operasional pada Program Tangerang Berkebun yang telah memiliki standar operasional untuk menjalankan program tersebut. Tahapannya adalah sosialisasi (pembekalan) dan temu teknis (praktik lapangan) yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan standar operasional program tersebut.

Adapun hasil observasi atas dimensi Karakteristik Agen Pelaksana pada Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Observasi Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

<b>Kebijakan/Program</b>	<b>Karakteristik Penilaian</b>	<b>Hasil Observasi</b>
Program Tangerang Berkebun	Karakteristik Agen Pelaksana	Peran Dinas Ketahanan Pangan pada pelaksanaan Program Tangerang Berkebun sudah sesuai sehingga pelaksanaan program tersebut sudah berjalan dengan baik.
	Standar Operasional Pelaksanaan Program	Standar pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Program Tangerang Berkebun sudah berjalan dengan baik.

(Sumber: Peneliti, 2018)

#### **4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi)**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan wawancara maka hasil penilaian atas dimensi Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pemahaman para pelaksana Program Tangerang Berkebun di Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti program tersebut sudah cukup baik karena program tersebut dapat berjalan dengan baik pula sebagaimana maksud dan tujuan yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa kendala, proses implementasi program tersebut tetap berjalan dengan cukup baik.



*Kedua*, para pelaksana Program Tangerang Berkebun di Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan ibu-ibu rumah tangga menyetujui pelaksanaan program tersebut. Bahkan masyarakat yang bukan bagian dari pelaksana program tersebut menyetujui ada dan dijalankannya program tersebut. Sebab program tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat juga lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Adapun hasil observasi atas dimensi Sikap/Kecenderungan (Disposisi) pada Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Observasi Atas Dimensi Sikap/Kecenderungan (Disposisi)**

<b>Kebijakan/Program</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Hasil Observasi</b>
Program Tangerang Berkebun	Pemahaman Pelaksana	Para pelaksana sudah memahami dengan baik maksud dan tujuan dari Program Tangerang Berkebun dan sudah menjalankannya dengan baik.
	Respon Pelaksana	Respon para pelaksana terhadap Program Tangerang Berkebun sangat baik, mereka antusias mengikuti program tersebut karena memberikan dampak positif bagi mereka dan lingkungan.

(Sumber: Peneliti, 2018)

## **5. Komunikasi Antar Organisasi**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi komunikasi antar organisasi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang bersama para pelaksana dan pihak terkait dalam implementasi Program Tangerang Berkebun sudah dilakukan dengan cukup baik.

*Kedua*, pada Program Tangerang Berkebun, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan sosialisasi mengenai program tersebut kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah ibu-ibu rumah tangga dengan baik. Sosialisasi dilakukan di kantor kecamatan dibantu oleh pihak kecamatan dan pihak kelurahan dimana titik lokasi program tersebut akan dijalankan.

Adapun hasil observasi atas dimensi Sikap/Kecenderungan (Disposisi) pada Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Observasi Atas Dimensi Komunikasi Antar Organisasi**

<b>Kebijakan/Program</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Hasil Observasi</b>
Program Tangerang Berkebun	Koordinasi Para Pelaksana	Para pelaksana Program Tangerang Berkebun telah berkoordinasi dengan baik terkait proses implementasi program tersebut, sehingga program tersebut masih berjalan hingga saat ini.
	Sosialisasi Kebijakan	Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut kemudian menjadi acuan masyarakat dalam melaksanakan Program Tangerang Berkebun.

(Sumber: Peneliti, 2018)

## 6. Lingkungan Eksternal

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Berjalannya Program Tangerang Berkebun telah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat, salah satunya mengurangi pembelian bahan-bahan memasak atau obat-obatan tradisional seperti jahe, kunyit, dan lain-lain.

*Kedua*, dampak dari Implementasi Program Tangerang Berkebun sangat terlihat pada lingkungan sosial masyarakat dimana program tersebut dijalankan. Lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi lebih asri dan bersih, kemudian hubungan antar masyarakat semakin baik karena memiliki kegiatan positif yang dapat dilakukan bersama-sama serta dapat berbagi ilmu kepada masyarakat lainnya yg berminat untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman atau sayuran namun belum memahami program tersebut.

*Ketiga*, Implementasi Program Tangerang Berkebun tidak terpengaruh dengan faktor politik. Para pelaksana dari kebijakan dan program tersebut tidak pernah mendapat bantuan politik apapun baik dari perorangan maupun kelompok politik tertentu.

Adapun hasil observasi atas dimensi Lingkungan Eksternal pada Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Observasi Atas Dimensi Lingkungan Eksternal**

Kebijakan/Program	Kriteria Penilaian	Hasil Observasi
Program Tangerang Berkebun	Ekonomi	Implementasi Program Tangerang Berkebun telah sangat terlihat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dimana program tersebut dijalankan. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari kegiatan budidaya yang mereka lakukan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan hasil budidaya dapat dijual.
	Sosial	Dampak sosial dari Program Tangerang Berkebun terlihat baik bagi lingkungan masyarakat dimana program tersebut dijalankan. Hubungan antar masyarakat menjadi lebih baik dan lingkungan tempat tinggal mereka pun menjadi lebih asri, lebih bersih, dan lebih indah.
	Politik	Implementasi Program Tangerang Berkebun tidak terpengaruh politik. Usaha yang dilakukan masyarakat hanya mendapat bantuan dari dinas terkait. Tidak mendapatkan bantuan politik dari perorangan atau kelompok politik tertentu.

*(Sumber: Peneliti, 2018)*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan di lapangan yang diperoleh terkait Implementasi Program Tangerang Berkebun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Tangerang Berkebun telah berjalan dengan semestinya. Namun ada beberapa hal yang membuat implementasi program tersebut kurang maksimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

*Pertama*, Faktor yang mendukung dari Implementasi Program Tangerang Berkebun adalah koordinasi terkait promosi Program Tangerang Berkebun. Belum ada koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang untuk mempromosikan Program Tangerang Berkebun ini. Promosi yang dilakukan dapat melalui pamflet atau secara *online* dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

*Kedua*, Faktor tidak mendukung Implementasi Program Tangerang Berkebun adalah tidak melibatkan masyarakat yang memang sudah berprofesi sebagai petani. Hal ini sangat disayangkan sebab jika sasaran program ini semakin meluas, konsep pertanian perkotaan akan lebih mudah diterapkan di Kota

Tangerang dan sektor pertanian di Kota Tangerang akan semakin meningkat jumlahnya apabila dibantu dengan intervensi pemerintah kepada pihak pengembang sehingga lahan-lahan yang semestinya digunakan sebagai lahan hijau tidak beralih fungsi menjadi bangunan.

## **5.2 Saran**

Meski Implementasi Program Tangerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah telah berjalan dengan semestinya, peneliti mengajukan saran-saran untuk digunakan sebagai rekomendasi dalam meningkatkan kualitas Program Tangerang Berkebun. Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan masyarakat yang memang berprofesi sebagai petani untuk menjadi pelaksana dari Program Tangerang Berkebun. Sebab meskipun usaha yang dijalani para petani adalah usaha pribadi, bukan program yang dibuat oleh pemerintah, namun para petani pun membutuhkan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung usaha pertanian mereka agar lebih baik.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi yang dapat membantu masyarakat memudahkan mencari informasi untuk proses budidaya tanaman mempromosikan produk/hasil budidaya yang mereka lakukan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang Program Tangerang Berkebun dan mengetahui jika terdapat usaha-usaha rumahan yang dihasilkan dari adanya Program Tangerang Berkebun.

3. Meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Memberikan konsep baru kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan secara teratur dan bersama-sama dengan masyarakat yang sudah melakukan kegiatan budidaya tanaman, sehingga dapat memotivasi masyarakat lainnya untuk ikut serta menjalankan Program Tangerang Berkebun.
4. Melibatkan kaum muda serta komunitas-komunitas pecinta lingkungan untuk menjadi penggerak kegiatan budidaya tanaman. Keterlibatan kaum muda maupun komunitas-komunitas pecinta lingkungan lambat laun akan menjadi motivasi bagi masyarakat lain, terutama kaum muda lainnya untuk mengikuti Program Tangerang Berkebun dan menerapkan kegiatan budidaya tanaman di lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2011. *Public Policy Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: CV Alfabeta.



Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yoeti, Oka A. 2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pertja.

Nuh, Mohammad dan Suhartono Winoto. 2017. *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Malang: UB Press.

### **Dokumen-Dokumen:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (2012-2032).

Laporan Final Studi Kelayakan. Pengembangan Wisata Kampung Agro. Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Tangerang Berkebun Edisi 2018 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.

Kota Tangerang Dalam Angka 2015 s.d 2017

Kecamatan Pinang Dalam Angka 2012 s.d 2017

Kecamatan Karang Tengah Dalam Angka 2012 s.d 2017

Statistik Indonesia Tahun 2018

**Sumber Lain:**

<http://jdihukum.tangerangkota.go.id>, dikunjungi pada hari Sabtu, 3 Januari 2015 pukul 10:36 WIB.

<http://pesona.indonesia.travel/destinasi/>, dikunjungi pada hari Senin, 23 Januari 2017 pukul 20:47 WIB.

<http://tangerangkota.bps.go.id>, dikunjungi pada hari Minggu, 18 Maret 2018 pukul 21:11 WIB.

<http://tangerangkota.go.id>, dikunjungi pada hari Senin, 30 April 2018 pukul 09:25 WIB.

<http://webgis.tangerangkota.go.id>, dikunjungi pada hari Minggu, 13 Mei 2018 pukul 21:19 WIB.

Sastrayuda, Gumelar S. 2010. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure dengan Judul *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And Leisure*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Pamulardi, Bambang. 2006. Tesis dengan Judul *Pengembangan Agrowisata Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Desa Wisata Tingkir, Salatiga)*. Universitas Diponegoro.

Fandeli, Chafid dan Mukhlison. 2000. Penelitian dengan Judul *Kebijakan Pengembangan Ekowisata: Pengembangan Ekowisata Dengan Paradigma Baru Pengelolaan Areal Konservasi*. Universitas Gajah Mada.

Pertiwi, Siska. 2011. Tugas Akhir dengan Judul *Budidaya Tanaman Stroberi Sebagai Penunjang Kepariwisata Di Daerah Ciwidey*. Universitas Sumatera Utara.

Lega, Michael. 2013. Skripsi dengan Judul *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sleman (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sihgiyanti, Vika Jessy. 2016. Skripsi dengan Judul *Evaluasi Implementasi Program Urban Farming Oleh Dinas Pertanian Di Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.

## Dokumentasi



Bersama para pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.



Bersama Ibu Nanik Kusumawati, SIP Staff Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.



Bersama Bapak Nurkholis, S.Ag., Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.



Bersama Bapak Riznur Masrun, S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.



Bersama Bapak Yoyo, S.IP. Sekretaris Kelurahan Pinang, Kota Tangerang.



Bersama Bapak Sianta Maulana, Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Panunggan Timur.



Usaha Budidaya Tanaman Hias Bapak Martani



Bersama Bapak Martani, Ketua Kelompok Usaha Tani Kelurahan Parung Jaya.



Usaha Budidaya Tanaman Hias Bapak Martani



Bersama Bapak Nasan Musa, Sekretaris Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah.

TITIK LOKASI TANGERANG BERKEBUN TAHUN 2015

NO	WILAYAH		TITIK LOKASI		DAFTAR KADER		LUAS LAHAN	LUAS LAHAN
	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	RT/RW	Nama dan Susunan Kelompok			
I	Kec. LARANGAN	1 Cipadu Jaya	Kantor Kelurahan Komp. Doplz 24	A 001001	Koordinator Anggota	JUWITA 1 SRIYAMAH	50 m <sup>2</sup>	50
		2 Larangan Selatan	Jl. Inpres No 15 Jl. Masjid Al Ikhlas	A 002003	Koordinator Anggota	MARIA 1 SULAESTRI	7 m x 12 m	90
		3 Larangan Utara	Jl. Barokah	A 003003	Koordinator Anggota	MAANI 1 SITI MULYANI	50 m <sup>2</sup>	50
		4 Cipadu Krik Person Eti Yustisli 81932571034	Jl. Lapangan	A 004001	Koordinator Anggota	ESTI SUSANTI 1 RUDI HARTONO 2 SUPARDI 3 JUHAIDI		
II	Kec. CILEDUG	1 Sudimara Barat		A 001008	Koordinator Anggota	IDA FARIDA 1 WA	50 m <sup>2</sup>	50
				B 001010	Koordinator Anggota	YUYUN 1 DEWI	250 m <sup>2</sup>	250
		2 Sudimara Timur	Jl. DR. Wahidin No. 32	A 002004	Koordinator Anggota	INA NOVRI DA 1 FARIDA SURAYA	10 m x 6 m	60
			Jl. Masjid 9 No. 38	B 002007	Koordinator Anggota	TAUHERUCIN 1 DADANG	10 m x 6 m	60
		3 Paninggilan Utara		A 003007	Koordinator Anggota	ILMARUF 1 LATIFAI	50 m <sup>2</sup>	50
				Jl. H. Nasir	B 003003	Koordinator Anggota	WALTYAHIBU DAYAT 1 SULAM	150 m <sup>2</sup>
		4 Sudimara Jaya	Kp. Blok Tanah Seraji Jl. WIRCA	A 004003	Koordinator Anggota	IBU JOHANA 1 YANTI	50 m <sup>2</sup>	50
				Jl. Sekeloa VII	B 004008	Koordinator Anggota	IBU Hj. WARTINI 1 MARNI	15 m x 8 m
III	Kec. KARANG TENGAH	1 Karang Mulya	Kp. Blok Jl. IDN	A 005003	Koordinator Anggota	DIANA 1 ROMAYATI	300 m <sup>2</sup>	300
				Kp. Blok Jl. H. Nam	B 005008	Koordinator Anggota	JANI 1 KARLIN	100 m <sup>2</sup>
		2 Karang Timur	Kp. Blok Mancung	A 006004	Koordinator Anggota	WIVI WITARSIH 1 ANNA ROS ANA	100 m <sup>2</sup>	100
				Kp. Blok Mancung	B 006002	Koordinator Anggota	ENTIN KURNIA 1 JURIAH	100 m <sup>2</sup>
		3 Karang Tengah	Komp. Pondok Jaya	A 007011	Koordinator Anggota	JAMILAH 1 HENI	100 m <sup>2</sup>	100
				Jl. G. dan Sari	B 007014	Koordinator Anggota	DEDEH ISKANDAR 1 IRWAI	150 m <sup>2</sup>
		4 Parung Jaya	Bekasang Kantor Kelurahan Parung Jaya	A 008001	Koordinator Anggota	NURSEHA 1 LIN	150 m <sup>2</sup>	150
				Samping Poyoncu Gelatik	B 008004	Koordinator Anggota	EDIS SUMIATYET 1 RUMIAT	40 m <sup>2</sup>
IV	Kec. PINANG	1 Kuturan Jaya	Kp. Comana II	A 009001	Koordinator Anggota	RUSNI 1 AYANIMAH	100 m <sup>2</sup>	100
				Kp. Kut. Selatan	B 009002	Koordinator Anggota	AYATI 1 T. ORGOSIDA	100 m <sup>2</sup>
		2 Pinang	Kp. Nalakan	A 010002	Koordinator Anggota	MULYANI 1 RUSMIAT	100 m <sup>2</sup>	100
				Kp. Pinang	B 010001	Koordinator Anggota	Hj. MARNI 1 NAFSIH	100 m <sup>2</sup>
		3 Verokteg		A 011001	Koordinator Anggota	ELVIRAWATI 1 MURHENI	100 m <sup>2</sup>	100
				B 011002	Koordinator Anggota	WANIH 1 NUR LAH	100 m <sup>2</sup>	100

NO	WILAYAH		TITIK LOKASI		DAFTAR KADER		LUAS LAHAN	LUAS LAHAN
	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	RT/RW	Nama dan Susunan Kelengkapan			
V	Kec. CIPANGDAH	4 Pabungangan Utara	Rok Meda	A 006/04	Koordinator Anggota	PERI 1 DEDEH	100 m <sup>2</sup>	100
			Sawah Dalam	B 002/05	Koordinator Anggota	NAMURI 1 YOKO	50 m <sup>2</sup>	50
		1 Kenanga	Kenanga	A 003/01	Koordinator Anggota	MAEMUNAH 1 MASUAH	50 m <sup>2</sup>	50
			Kenanga	E 003/01	Koordinator Anggota	YENI SRIMAHYUNI 1 KUSWATI YUNI ASTUTI	50 m <sup>2</sup>	50
		2 Peris Plawad Utara	Jl. KH. Mustopa	A 001/04	Koordinator Anggota	MUHAMMAD 1 SUWATI	100 m <sup>2</sup>	100
			Purandoran (Puri Dewata Indah)	B 003/03	Koordinator Anggota	KASHO 1 IMRYANI	100 m <sup>2</sup>	100
		3 Peris Plawad	J. Paha	A 001/03	Koordinator Anggota	ENDANG SUPRIYATI 1 SAFWATI	100 m <sup>2</sup>	100
			Jl. Panglima Polim	B 002/01	Koordinator Anggota	SARON 1 IDA FARIDA	100 m <sup>2</sup>	100
		4 Peris Plawad Indah	Posyandu Rajawali	A 001/03	Koordinator Anggota	SIMUN 1 ANSAR	100 m <sup>2</sup>	100
			Posyandu Beo	B 001/003	Koordinator Anggota	GOM 1 HIMAN	100 m <sup>2</sup>	100
VI	Kec. BATUCEREP	1 Batu Sari	Durusalam Utara I BOUGENVILLE V	A 0002	Koordinator Anggota	NAEMUNAH YULIANTI 1 SEMI	100 m <sup>2</sup>	100
			Durusalam Utara II BOUGENVILLE VI	B 0206	Koordinator Anggota	MARYATUN 1 YUNIAR	50 m <sup>2</sup>	50
		2 Peris Gaga	Kantor Kel. Pongsaga	A 0403	Koordinator Anggota	ZURNA DETY 1 MASTUR	3 m <sup>2</sup>	30
			Rok Amban Kel. Pongsaga	B 003/05	Koordinator Anggota	SMIRDKI 1 SANIYA	50 m <sup>2</sup>	50
		3 Betujaya		A 005/05	Koordinator Anggota	ALIYAH 1 YULFAH	100 m <sup>2</sup>	100
				B 003/06	Koordinator Anggota	DIAH KOMARIAH 1 NENEK MAMUN	100 m <sup>2</sup>	100
		4 Peris Jaya	Posyandu Cempaka 1	A 001/03	Koordinator Anggota	ERNAH SUMYATI 1 H. SRI MULYANI	50 m <sup>2</sup>	50
			Cempaka 5 Cempaka 2	B 003/07	Koordinator Anggota	WIDARSIH 1 MUKAWAROH	50 m <sup>2</sup>	50
		VII	Kec. NEGLASARI	1 Neglasari	Kp. Sindangsene	A 005/007	Koordinator Anggota	SUKARELAH 1 WATI SUSANTI
Kp. Sindangsene	B 002/009				Koordinator Anggota	MULYAN 1 YUYUN	40 m <sup>2</sup>	40
2 Karang Sari				A 005/012	Koordinator Anggota	GUMIATI 1 SAPTAH YOSIH	50 m <sup>2</sup>	50
				B 001/004	Koordinator Anggota	SRI ENDANG 1 LISTIANI PUJI ASTUTI	100 m <sup>2</sup>	100
3 Kedauag Wetan				A 005/04	Koordinator Anggota	Ny. NENI TRI JUJASTUTI 1 H. TATI ROSTIATI	100 m <sup>2</sup>	100
				B 005/002	Koordinator Anggota	Ny. ANNA K 1 Ny. DEWI SURYA	100 m <sup>2</sup>	100
4 Selapajang Jaya				A 003/09	Koordinator Anggota	ROHANA 1 M. A	150 m <sup>2</sup> - 200	200
				B 001/001	Koordinator Anggota	Ny. ANNA K 1 Ny. DEWI SURYA	100 m <sup>2</sup>	100
VIII	Kec. PERIUK	1 Peruk Jaya	Disinggong Posyandu	A 007/005	Koordinator Anggota	ELIS YUNIA TITIK 1 SITI AMINAH	7 m x 14 m	98
				B 003/008	Koordinator Anggota	CAHYA WIDATI 1 MELANI KUSUMAWATI	5 m x 15 m	75

NO	WILAYAH		TITIK LOKASI		DAFTAR KADER		LUAS LAHAN	LUAS LAHAN		
	Kecamatan	Korwilahan	Alamat	RT/RW	Nama dan Susunan Kelompok					
					Koordinator	Anggota				
IX	Kec. KARAWACI	2 Periak	Melati 0	A RW 09	Koordinator	SITI RUSMALA DEWI	3 m x 6 m	40		
			Melati 15	B RW 14	Koordinator	1 SILVANA IRWAN	100 m <sup>2</sup>	100		
		3 Gebang Raya	Kantor Kelurahan	A RW 10	Koordinator	WAWAN	80 m <sup>2</sup>	80		
				B RW 01	Koordinator	1 SUCHYANTI	45 m <sup>2</sup>	45		
		4 Sangiang Jaya	000002	A RT 05 / RW 02	Koordinator	WARYATI	20 m <sup>2</sup>	20		
				B RT 04 / RW 01	Koordinator	1 ACHENY HADI	15 m <sup>2</sup>	15		
		1 Pabuaran	Cg. Sunda 1	A 00303	Koordinator	HANIK THOWILAH	60 m <sup>2</sup>	60		
			J. Dharma Badi	B 00504	Koordinator	1 MULYANAH	65 m <sup>2</sup>	65		
		2 Sumur Pading	Kantor Kelurahan	A 00401	Koordinator	H. SAHRAN, P	150 m <sup>2</sup>	30		
			Kantor Kelurahan	B 00103	Koordinator	1 DAMBANG SUGIARTO	60 m <sup>2</sup>	60		
		3 Kuang Jaya	Posyandu Perhutut Kp. Uluu Belakang Posyandut ± 50 m <sup>2</sup>	A 00105	Koordinator	SUKIMAK	50 m <sup>2</sup>	50		
			Kp. Duri Belakang Rumah Du (Widu) ± 50 m <sup>2</sup>	B 00306	Koordinator	1 H. ENDANG	± 50 m <sup>2</sup>	50		
4 Pabuaran Tumpang	Kebun RT	A 00104	Koordinator	SUSILOWATI	40 m <sup>2</sup>	40				
	Dapan RS. KETUARA ISU	B 00105	Koordinator	1 CICH SUKAESIH	25 m <sup>2</sup>	25				
X	Kec. TAMERANG	1 Cikokol	Posyandu Mawar	A RW 001	Koordinator	NURJANAH	7 m x 7 m	40		
			Posyandu Garbaga Damal	B RW 004	Koordinator	1 DAWANTI	7 m x 6 m	42		
		2 Buaran Indah	Komp. Ketahanan	A 00201	Koordinator	SITI KHADIJAH	8 m x 6 m	48		
			Jl. TL. Panti II	B 00507	Koordinator	1 RATNAWATI	60 m <sup>2</sup>	60		
		3 Tanah Tinggi	Jl. Meteorologi Ug. Mangga	A 00203	Koordinator	2 SITI JUWALYAH	6 m x 6 m	36		
			Komp. Inggris	B 00211	Koordinator	MEHWA	7 m x 7 m	49		
		4 Babakan	Kp/Blok Posyandu Angrek	A 00403	Koordinator	1 LIEW GICK TJAN	7 m x 6 m	42		
			Kp/Blok Buaran Kandang Besar	B 00601	Koordinator	2 WITEN	6 m x 6 m	36		
		XI	Kec. JATIMUNGGA	1 Kerencong	Blok EP PASOS / PASUM Forum Kerencong Henna	A 01202	Koordinator	MINARNI	2 m x 8 m	16
						B 00103	Koordinator	1 AM	3 m x 4 m	12
				2 Alam Jaya	Kp. Ladang Pabrik	A 00101	Koordinator	H. SUMARYO W.P	10 m x 15 m	150
					Kp. Ladang Pabrik	B	Koordinator	1 SUROTO	10 m x 15 m	150
3 Pasir Jaya	Kp/Blok BTR			A 00103	Koordinator	ROHAYU	3 m x 5 m	15		
					Koordinator	1 ETIN				



NO	WILAYAH		TITIK LOKASI		DAFTAR KADER		LUAS LAHAN	LUAS LAHAN
	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	RT/RW	Nama dan Subunan Kelompok			
XII	Kec. CIBODAS	1 Manis Jaya	Kp/Blok Pasir Jaya	B 009/03	Koordinator Anggota	Ms. OYI SUNIYATI 1 Nj. IYUM	3 m x 5 m	15
				A	Koordinator Anggota	EDAH 1 KARTINI	10 m x 6 m	60
				B 002/04	Koordinator Anggota	ARSIH 1 HERAYATI	10 m x 5 m	50
				A 105/03	Koordinator Anggota	SITI MILA 1 ANIH	20 m x 20 m	400
		1 Cibodas	Kp/Blok Dusa Asri	B 032/011	Koordinator Anggota	RCKHANI 1 MA LILDYANI	10 m x 6 m	60
				A 002/03	Koordinator Anggota	ELLY ANGGRAENI 1 ENDOKAY	8 m x 12 m	96
				B 002/12	Koordinator Anggota	TITIN SUTINI 1 AYOH GARMAN	8 m x 12 m	96
				A 004/011	Koordinator Anggota	BATNA KUMALA 1 NURHAYATI	12 m x 9 m	108
		3 Ujung Jaya	Posyandu Mawar	B 002/12	Koordinator Anggota	PENDI 1 AAN	12 m x 8 m	96
				A 005/013	Koordinator Anggota	LURIAH 1 RONI	300 m <sup>2</sup>	300
				B 001/04	Koordinator Anggota	ELIN PARLINA 1 TH. N	300 m <sup>2</sup>	300
				A 003/07	Koordinator Anggota	MUNIRCH 1 SITI RUSMANI	50 m <sup>2</sup>	50
4 Farungangan Barat	Kp/Blok Dahang	B 003/09	Koordinator Anggota	YOYO MUNIRCH 1 K. IORIANA	50 m <sup>2</sup>	50		
		A 003/02	Koordinator Anggota	KHOJILAH 1 TAMJUA	200 m <sup>2</sup>	200		
		B 004/08	Koordinator Anggota	YETIS 1 KHOIMAH	50 m <sup>2</sup>	50		
		A 002/002	Koordinator Anggota	SITI RAHMAH 1 TUT. ARIYANI	300 m <sup>2</sup>	300		
1 Delendjung	Jl. Sinar Raya	B 001/004	Koordinator Anggota	SRI TAUNI 1 DA SUPRIDA	300 m <sup>2</sup>	300		
		A 02/03	Koordinator Anggota	TUTI ALAWIYAH 1 SITI KOMARIAH	100 m <sup>2</sup>	100		
		B 001/04	Koordinator Anggota	MARIA 1 YOPYUSRO	50 m <sup>2</sup>	50		
		A 002/002	Koordinator Anggota					
2 Jurumudi	Kp/Blok Bulak Kambang	B 001/04	Koordinator Anggota					
		A 002/002	Koordinator Anggota					
		B 001/04	Koordinator Anggota					
		A 002/002	Koordinator Anggota					
3 Jurumudi Baru	Kp/Blok Rese Camp	B 001/04	Koordinator Anggota					
		A 002/002	Koordinator Anggota					
		B 001/04	Koordinator Anggota					
		A 002/002	Koordinator Anggota					
4 Palang		B 001/04	Koordinator Anggota					
		A 002/002	Koordinator Anggota					
		B 001/04	Koordinator Anggota					
		A 002/002	Koordinator Anggota					
						TOTAL	8.763,50	

Kecamatan		Tahun 2014		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Kelurahan	RT/RW	Kelurahan	RT/RW	Kelurahan	RW
Tangerang	1	DABAKAN	05/04	Cikokol			
	2	SABAKAN	02/05	Sukarasa	04/13	Cikokol	13
	3	SUKAASIH	01/01	Sukaasih	06/07	Tanah Tinggi	11
	4	SUKAASIH	03/01	Buaran Indah	01	Biraran Indah	6
	5	SUKARASA	06/07	Tanah Tinggi	04/03	Babakan	1
	6	BUARAN INDAH	04/09	Tanah Tinggi	03/07	Kelapa Indah	6
	7	BUARAN INDAH	02/09	Tanah Tinggi	01/06	Sukasari	16
	8	TANAH TINGGI	01/06	Tanah Tinggi	01/08		
	9	TANAH TINGGI	13	Tanah Tinggi	04/04		
	10	TANAH TINGGI	01/07	Kelapa Indah	02/05		
	11	TANAH TINGGI	02/01				
	12	TANAH TINGGI	05/15				
	13	TANAH TINGGI	16				
	14	CIKOKOL	04/05				
	15	CIKOKOL	02/10				
	16	CIKOKOL	07				
	17	CIKOKOL	08				
	18	CIKOKOL	13				
	19	KELAPA INDAH	04/04				
	20	KELAPA INDAH	02/04				
	21	SUKASARI					
	22	SUKASARI					
	23	SUKASARI	08				
	24	SUKASARI					
	25	SUKASARI					
Karawaci	1	NUSA JAYA	06	Nusa Jaya			
	2	KARAWACI BARU	04	Margasari	01/11	Karawaci	5
	3	KARAWACI	04	Margasari	04/01	Bujong Jaya	1
	4	CIMONE	04	Margasari	02/05	Koang Jaya	5
	5	CIMONE JAYA	04	Margasari	02/03	Sumur Pacing	4
	6	CIMONE JAYA	07	Karawaci Baru	03/04	Cimone	3
	7	BOJONG JAYA	05	Koang Jaya	04	Pasar baru	2
	8	PABUARAN TUMPENG	05	Paburan Tumpeng	02/05	Bugel	13
	9	PABUARAN TUMPENG	10	Bojong Jaya	03/01	Gerendeng	9
	10	SUMUR PANCING	01			Faauran	7
	11	BUGEL					
	12	MARGASARI					
	13	MARGASARI					
	14	MARGASARI					
	15	NAMBO JAYA	03				
	16	NAMBO JAYA	04				
	17	NAMBO JAYA	05				
	18	PASAR BARU	04				
	19	PABUARAN	02				
	20	PABUARAN	06				
	21	KOANG JAYA					
	22	GERENDENG	07				
	23	SUKAIADI	02				
	24	NAMBO JAYA	01				
	25	NAMBO JAYA	02				
	1	CIPONDOK	06/10	Cipondok Makmur	05/06	Cipondok	
	2	CIPONDOK	05	Cipondok Makmur	02/01	Cipondok Makmur	8
	3	CIPONDOK	04/07	Cipondok Makmur	12	Ketapang	2
	4	CIPONDOK	03/01	Cipondok	04/03	Poris Plawad Indah	1
	5	CIPONDOK MAKMUR	07/04	Cipondok Indah	02/06	Poris Plawad	3
	6	CIPONDOK MAKMUR	01/07	Cipondok Indah	08/01	Kenanga	5
	7	CIPONDOK MAKMUR	02/09	Cipondok	03/03	Petir	7
	8	KENANGA	04/04	Kenanga	04/06	Poris Plawad Utara	4
	9	KENANGA	07/02	Kenanga	01/02	Gondrong	5
	10	GONDRONG	02/03	Poris Plawad Utara	06		
	11	GONDRONG	02/03	Cipondok	03/03		
17	PETIR	01/03					

Cipondoh	13	PETIR	03/06				
	14	CIPONDOH INDAH	01/02				
	15	CIPONDOH INDAH	01/05				
	16	KETAPANG	01/05				
	17	KETAPANG	02/05				
	18	PORIS PLAWAD	04/03				
	19	PORIS PLAWAD	08				
	20	PORIS PLAWAD INDAH	01/03				
	21	PORIS PLAWAD INDAH	03/08				
	22	PORIS PLAWAD UTARA	01/02				
	23	PORIS PLAWAD UTARA	05/06				
	24	PORIS PLAWAD INDAH	02/01				
25	PORIS PLAWAD INDAH	16					
Batuceper	1	BATUCEPER	04/02	Poris Gaga Baru	01/05	Poris Gaga Baru	2
	2	BATUCEPER	05/07	Batuceper	04/02	Datu Ceper	2
	3	BATUCEPER	03/04	Batusari	01/04	Poris gaga	2
	4	BATUCEPER	06/04	Poris Gaga Baru	05/02	Batu ceper	1
	5	BATUJAYA	03/01	Batusari	05/03	Poris jaya	3
	6	BATUJAYA	03/02	Poris Gaga Baru	03/08	kebun besar	1
	7	BATUJAYA	03/05	Batujaya	01/05	Batusari	4
	8	BATUJAYA	03/03				
	9	BATUSARI	01/02				
	10	BATUSARI	01/02				
	11	BATUSARI	04/03				
	12	BATUSARI	04/04				
	13	KEBON BESAR	02/03				
	14	KEBON BESAR	01/04				
	15	KEBON BESAR	04/04				
	16	PORIS GAGA	02/01				
	17	PORIS GAGA	01/02				
	18	PORIS GAGA	02/05				
	19	PORIS GAGA	01/06				
	20	PORIS JAYA	02/01				
	21	PORIS JAYA	02/03				
	22	PORIS JAYA	01/04				
	23	PORIS GAGA BARU	05/02				
	24	PORIS GAGA BARU	03/02				
	25	PORIS GAGA BARU	05/03				
Benda				Pajang	01/01	Pajang	1
				Benda	03/02	Benda	2
				Benda	04/10	Belendung	8
				Belendung	02/07	Benda	8
				Belendung	03/06	Jurumudi Baru	9
				Belendung	05/08	Benda	10
				Jurumudi	02/02		
				Jurumudi	07/08		
				Jurumudi Baru	01/03		
				Jurumudi Baru	05/03		
				Larangan Utara	03/01	Cipadu	1
				Larangan Utara	04/05	Kreo	5
				Kreo	01/02	Larangan Utara	1
				Kreo	01/05	Gaga	1
				Kreo	04	Cipadu	5
						Cipadu jaya	6
						Larangan indah	1
						Kreo selatan	6





Jatiwang		Pasir Jaya	01/04		
Periuk		Periuk Jaya	05/04	Gembor	1
		Gembor	02	Periuk Jaya (Bayur)	4
		Gembor	01	Sangiang Jaya	2
		Gembor	06	Periuk	5
		Gembor	03/01	Gebang Raya	2
Neglasari		Kedaung Baru	01/03	Kedaung Wetan	4
		Kedaung Baru	04	Kedaung Baru	3
		Mekarsari	03/03		4
		Mekarsari	05/01	Karanganyar	5
		Karang Anyar	03/03		6
		Karang Anyar	02/02	Mekarsari	3
				Kedaung Baru	2
				Neglasari	8
				Serapajang Jaya	4
Dinane		Kunciran	01/01	Pakojan	1
		Kunciran	04/05	Kunciran Jaya	2
		Panunggangan Utara	05/04	Sudimaran Pinang	5
		Cipete	02/04	Cipete	5
		Cipete	03/04	Pinang	5
		Pakojan	01/01	Kunciran	3
		Panunggangan Timur	02/05	Neroktog	2
		Kunciran Jaya	01/01	Neroktog	5
		Neroktog	03/01		
		Neroktog	05/01		

**BERITA ACARA PENERIMAAN BENIH TANGERANG BERKEBUN  
KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sudah Terima Dari : Kepala Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan  
 Banyaknya : 1 (satu) Paket  
 Nomor Paket :  
 Keperluan : Benih untuk Tangerang Berkebun TA 2018  
 Hari / Tanggal :  
 Lokasi :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	<i>Belanja Benih Tangerang Berkebun</i>		
	- Tomat	5	Bungkus
	- Caisim	5	Kaleng
	- Kangkung	3	Bungkus
	- Pakcoy	10	Bungkus
	- Bayam	2	Bungkus
	- Cabe Merah	5	Bungkus
	- Cabe rawit	5	Bungkus
	- Paria	5	Bungkus
	- Terong	5	Bungkus
	- Kacang panjang	2	Bungkus
	- Oyong	5	Bungkus
	- Timun	5	Bungkus

**BERITA ACARA PENERIMAAN SARANA TANGERANG BERKEBUN  
KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sudah Terima Dari : Kepala Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan  
 Banyaknya : 1 (satu) Paket  
 Nomor Paket :  
 Keperluan : Sarana untuk Tangerang Berkebun TA 2018  
 Hari / Tanggal :  
 Lokasi :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	<i>Belanja sarana untuk Tangerang Berkebun</i>		
	- Pupuk Kandang	20	Karung
	- Pacul bergagang	1	Buah
	- Gembor	2	Buah
	- Toolkit berkebun	4	Set
	- Polybag	2	Kg
	- Pot persegi	25	Buah
3	<i>Belanja Bahan Kimia</i>		
	- Pengendali hama lanaman alami	4	Dus
	- Pupuk Cair Organik	4	Bctol

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TANGERANG BERKEBUN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	Pagu Anggaran Kegiatan (Rp)
1	Honorarium Tim PNS	176.640.000
2	Honorarium Tim Non PNS	23.600.000
3	Uang Saku Peserta Tangerang Berkebun	59.000.000
4	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	149.774.400
5	Belanja bahan kimia	25.320.000
6	Belanja Bahan/Perlengkapan Pertanian, Peternakan, Perikanan	183.062.400
7	Belanja makan dan minum kegiatan/peserta	76.500.000
8	Belanja kaos pameran/pendidikan/pelatihan	53.120.000
9	Belanja Narasumber PNS	7.200.000
10	Belanja Narasumber Non PNS	161.400.000
		<b>915.616.800</b>

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TANGERANG BERKEBUN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian	Pagu Anggaran Kegiatan (Rp)
1	Honorarium Tim Non PNS	41.000.000
2	Belanja bahan kegiatan	406.040.000
3	Belanja makan dan minum kegiatan/peserta	59.625.000
4	Belanja kaos pameran/pendidikan/pelatihan	81.528.000
5	Uang Saku Peserta Non PNS	76.000.000
		<b>664.193.000</b>



Kegiatan Tangerang Berkebun Tahun 2017

Honor Tim Pendamping Tangbun (Penyuluh Non Pegawai Kota Tangerang)	:	40.000.000
Belanja Benih Tangerang Berkebun	:	183.090.000
Belanja Bahan Kimia Berupa Pupuk Cair dan Pengendali Hama	:	45.696.000
Topi untuk Temu Teknis Tangerang Berkebun	:	20.000.000
Buku Tangerang Berkebun	:	27.500.000
Uang Saku Peserta Pembekalan Tangerang Berkebun	:	70.000.000
Uang Saku Peserta Temu Teknis Tangerang Berkebun	:	75.000.000
<b>TOTAL</b>	:	<b>461.286.000</b>



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 Telp. 021 - 55726851

TANDA TERIMA

Surat No : 5770 / Un. 43.6.1 / P5 / 2018  
 Tanggal Surat : 15 April 18  
 Dari : Untiriz  
 Perihal : Permohonan Ijin mencari data

Tangerang, 15 Mei 2018

*[Signature]*  
 Penerima

( Nama )



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 JALAN KS.TUBUN NO. 96 TELP. (021) 5534067 FAX.  
 56771508  
 T A N G E R A N G

Tanda Terima

Nomor : 5814 / UN. 43.6.1 / P5 / 2018  
 Dari : Dhoni Chairani  
 Perihal : Permohonan Ijin mencari data

TANGERANG 15 - 05 - 2018

Penerima

Pengirim

*[Signature]*  
 AMELIA

( ..... )

## Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nani Kusumawati S.P

Pekerjaan/Jabatan : PNS.

Usia : 51 th.

No. Telp/Handphone: 089508450762

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Dhani Chairani

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

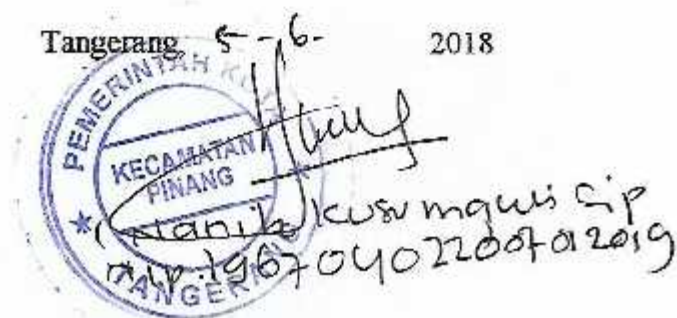
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

NIM : 6661110960

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Tangerang 5-6-2018



## Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Khair  
Pekerjaan/Jabatan : DKS / Kepala Sub Bag P.K.  
Usia : 41 th.  
No. Telp/Handphone: 081282961976

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Dhani Chairani  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
NIM : 6661110960

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.



## Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Anefyanto .  
Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kabid Restoran .  
Usia : 40 thn .  
No. Telp/Handphone: 081315337599 .

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Dhani Chairani  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
NIM : 6661110960

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Tangerang,

2018

  
Ibnu Anefyanto .  
( Ibnu Anefyanto . )

## Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Ahmaa Yoni .S.Pd M.Pd .*  
Pekerjaan/Jabatan : *Kepala Seksi. Wisata. Pariwisata.*  
Usia : *50 th.*  
No. Telp/Handphone: *087886554463*

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : **Dhani Chairani**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**  
NIM : **6661110960**

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Tangerang,

2018



## Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURKHOLIS, S.Ag  
Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Perencanaan  
Usia : 42 Tahun  
No. Telp/Handphone: 0812 8967 0427

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Dhani Chairani  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
NIM : 6661110960

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Tangerang 2018



The image shows a circular official stamp from the Government of Tangerang. The text inside the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG" and "DINAS KEMENTERIAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "NURKHOLIS, S.Ag".

## Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riznur Masrun ST., MT.  
Pekerjaan/Jabatan : Kabid Tata Ruang DPUPR - Kota Tangerang  
Usia : 42 Tahun  
No. Telp/Handphone: 0852 14947400

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Dhani Chairani  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
NIM : 6661110960

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Tangcrang 22 Mei 2018



( Riznur Masrun )





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Palkapatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 5778 /UN.43.6.1/PG/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

19 April 2018

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang  
di  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Dhani Chairani  
NIM : 6661110960

Semester : 14  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032 (Studi Kasus Pengembangan Kegiatan Agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah).

Data Diperlukan : 1. Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
2. Rencana induk dan rencana strategis pengembangan pertanian di Kota Tangerang;  
3. Tahap-tahap yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dalam pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
4. Peraturan penyelenggaraan kebijakan agro wisata di Kota Tangerang;

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik  
  
Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 5779 /UN.43.6.1/PG/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

19 April 2018

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang  
di  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Dhani Chairani  
NIM : 6661110960

Semester : 14  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032  
(Studi Kasus Pengembangan Kegiatan Agrowisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah).

Data Diperlukan : 1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dalam pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
2. Tahap-tahap yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dalam pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
3. Peraturan penyelenggaraan kebijakan agro wisata di Kota Tangerang;  
4. Data studi kelayakan agro wisata di Kecamatan Karang Tengah;

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik



Lisvianingsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197608292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Publik  
 2. Ilmu Komunikasi  
 3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 283330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
 url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kcutak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kcutak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : **5780 /UN.43.6.1/PG/2018**  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

19 April 2018

Kepada Yth.  
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang  
 di  
 Tempat

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Dhani Chairani  
 NIM : 6661110960

Semester : 14  
 Mata Kuliah : Skripsi  
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032 (Studi Kasus Pengembangan Kegiatan Agrowisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah).

Data Diperlukan :  
 1. Dokumen rencana pengembangan kegiatan agro wisata di Kota Tangerang;  
 2. Peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang dalam pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
 3. Tahapan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
 4. Pencapaian dan kendala pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah pada kebijakan RTRW terdahulu.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
 Ilmu Administrasi Publik  
  
 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Prodi Administrasi  
 Listyaningsih, S.Sos., M.Si  
 NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 341 /UN.43.6.1/PG/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

27 April 2018

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang  
di  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Dhani Chairani  
NIM : 6661110960

Semester : 14  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032  
(Studi Kasus Pengembangan Kegiatan Agrowisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah).  
Data Diperlukan : 1. Peran Dinas PUPR dalam pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
2. Penentuan kawasan peruntukan pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah;  
3. Dokumen RTRW terdahulu;  
4. Perubahan ruang wilayah Kota Tangerang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik

  
Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197608292003122001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Dhani Chairani  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Jakarta, 04 Juli 1993  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Komplek Sekretariat Negara RI Blok B8/5 RT.004 RW.003  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang  
Kode pos: 15143  
**Nomor Telepon** : 0899-8289-822  
**E-mail** : dhchairani@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1) Sekolah Dasar Negeri Kramat Pela 013 Pagi, Jakarta Selatan
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Tangerang
- 3) Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kota Tangerang
- 4) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, S1 Ilmu Administrasi Publik